KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM & EKOSISTEM
DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019

Collective Action

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2019

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2015-2019

Penyusun:
Pengarah : Dyah Murtiningsih

Tim Penyusun : R. Hendratmoko
Peggy A. N. Krisna
Dian Risdianto
Hasan Basri
Suswaji
Yohanes D. Susilo
Andhika C. Ariyanto
Alfin M. Alfiyasin
Ridwan

Keterangan Sampul :
Taman Nasional Sebangau oleh Hidayatur Rahman (Balai TN Sebangau)

Dicetak dengan menggunakan pendanaan dari
DIPA Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Salah satu Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dinilai melalui metode evaluasi dengan perangkat *Management Effectiveness Tracking Tool* (MEET). Selama hampir empat dekade pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, secara formal belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan evaluasi sebagai bagian dari siklus pengelolaan (*management*) bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan nilai penting masing-masing kawasan.

Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 ini berisi analisis singkat tentang hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada parapihak yang ikut bekerja keras terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penilaian, implementasi peningkatan efektivitas maupun dalam pembuatan laporan ini, mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai (Besar) Taman Nasional dan Balai (Besar) Konservasi Sumber Daya Alam, UPT Taman Hutan Raya, dan para mitra, yaitu WCS-IP, FFI, ZSL, Forum Harimau Kita, Sintas Indonesia dan proyek kerja sama seperti *Sumatran Tiger Project*, E-PASS dan USAID Lestari.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Direktur Kawasan Konservasi

Dyah Murtiningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
I. PENDAHULUAN 1
II. METODE PENILAIAN 4
A. Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi 6
B. Data Ancaman Kawasan Konservasi 7
C. Lembar Penilaian 8
III. TARGET DAN CAPAIAN 10
A. TARGET 2015-2019 10
B. CAPAIAN PER TAHUN 2015-2019 13
1. Capaian 2015 13
2. Capaian 2016 15
3. Capaian 2017 16
4. Capaian 2018 18
5. Capaian 2019 21
C. RESUME CAPAIAN 2015-2019 24
D. ANCAMAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI 35
IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI 43
A. EVALUASI 43
1. Evaluasi Metode dan Mekanisme Penilaian 43
2. Manajerial Pengawalan 45
3. Tindak Lanjut Hasil Penilaian 45
B. REKOMENDASI 46
V. PENUTUP 47
REFERENSI 48
LAMPIRAN 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kawasan Konservasi di Indonesia 3
Gambar 2. Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IUCN, 2006) 5
Gambar 3. Lembar Data Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi 7
Gambar 4. Lembar Data Ancaman Kawasan Konservasi 8
Gambar 5. Rincian Pertanyaan Dalam Enam Elemen Pengelolaan Berdasarkan METT 9
Gambar 6. Lembar Data Penilaian Kawasan Konservasi 9
Gambar 7. Strategi Pencapaian Target Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan METT Tahun 2015-2019 11
Gambar 8. Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 12
Gambar 9. Distribusi Kawasan Konservasi Target Berdasarkan Fungsi 12
Gambar 10. Capaian Penilaian 2015 13
Gambar 11. Taman Nasional Dengan Skor METT ≥70% 14
Gambar 12. Capaian Penilaian 2016 15
Gambar 13. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2016 16
Gambar 14. Capaian Penilaian 2017 17
Gambar 15. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2017 .18
Gambar 16. Capaian Penialaian 2018 19
Gambar 17. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2018 .20
Gambar 18. Capaian Penilaian 2019 21
Gambar 19. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2019 .23
Gambar 20. Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di TN Wakatobi 24
Gambar 21. Resume Capaian Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2015-2019 25
Gambar 22. Kawasan Konservasi yang Sudah dan Belum Dilakukan Penilaian 26
Gambar 23. Capaian per Tahun per Fungsi Kawasan.....26
Gambar 24. Kawasan Konservasi dengan Nilai ≥ 70% Pada UPT KSDA.....30
Gambar 25. Kategori Ancaman di Kawasan Konservasi 36
Gambar 26. Jenis Ancaman di Kawasan Konservasi 38
Gambar 27. Perburuan Satwa Liar di TN Kerinci Seblat 39
Gambar 28. Ilegal Logging Di Tahura Bukit Soeharto 40
Gambar 29. Kegiatan Wisata Alam di TN Gunung Merapi 41
Gambar 30. Kebun Kopi di Dalam Kawasan TN Kerinci Seblat 42

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019

LAPORAN AKHIR PENCAPAIAN KINERJA

I. PENDAHULUAN

Penetapan kawasan konservasi sebagai strategi konservasi keanekaragaman hayati merupakan satu hal penting yang dapat diandalkan, dengan asumsi bahwa kawasan ini diharapkan dapat melindungi nilai-nilai penting yang ada di dalamnya untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dibutuhkan investasi yang sangat besar termasuk anggaran, sumberdaya manusia, serta manajemen pengelolaan yang spesifik.

Publik dan pengelola kawasan mulai menyadari bahwa mereka perlu menilai hasil kegiatan manajemen pengelolaan yang telah dilakukan tersebut, apakah sudah mencapai tujuan dan mandat konservasi yang disematkan? Menurut Fiona *et al.*, 2010 beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah:

- Apakah pengelolaan kawasan yang dilakukan telah efektif dan bagaimana cara meningkatkannya?
- Apakah kawasan konservasi mampu melestarikan nilai penting yang ada?
- Apakah proyek, intervensi, dan kegiatan manajemen tertentu yang dilakukan sudah mencapai tujuannya dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan?

Pengelola kawasan mulai menyadari bahwa mereka perlu menilai hasil kegiatan manajemen pengelolaan yang telah dilakukan, apakah sudah mencapai tujuan dan

Ada banyak alasan mengapa negara, organisasi non-pemerintah, pengelola kawasan, donor, dan lainnya ingin menilai efektivitas manajemen. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda sehingga kemungkinan juga memerlukan sistem penilaian yang berbeda. Secara umum, beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi efektivitas manajemen pengelolaan kawasan adalah (Fiona *et al*., 2010):

- Mendukung pendekatan adaptif untuk pengelolaan kawasan;
- Membantu dalam pengalokasian sumber daya yang efektif baik di dalam maupun di sekitar kawasan;
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- Meningkatkan kesadaran atas nilai penting kawasan dari seluruh pemangku kepentingan;
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat; dan
- Pelaksanaan komitmen internasional dalam rangka program kerja konvensi keanekaragaman hayati (*Program of work convention on biological diversity*)

Sebagai banteng perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem, eksistensi suatu kawasan konservasi sangat penting untuk dijaga dan ditingkatkan kualitas pengelolaannya sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya serta pembangunan berkelanjutan. Terdapat 554 unit kawasan konservasi, dengan luas mencapai lebih dari 27 juta hektar yang tersebar di berbagai wilayah baik daratan maupun perairan, dan mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di Indonesia. Gambaran jumlah unit kawasan konservasi di yang ada di Indonesia, disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kawasan Konservasi di Indonesia

Dalam rangka menjaga keberadaan dan potensi berbagai jenis sumber daya yang ada di dalam kawasan konservasi dan melihat sejauh mana pengelolaan terhadap suatu kawasan telah dilakukan, maka perlu dilakukan pemantauan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kawasan telah dikelola sesuai dengan tujuan atau mandat konservasi yang ditetapkan, dan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi yang dianggap masih lemah. Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan.

II. METODE PENILAIAN

Sejak tahun 2015 pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara resmi mengadopsi metode *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) sebagai perangkat atau *tool* untuk penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terestrial. Khusus untuk kawasan konservasi perairan perangkat penilaian yang digunakan adalah *Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas* (*The World Bank*, 2004) yang telah diterjemahkan sebagai perangkat untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi perairan.

Penggunaan METT di Indonesia oleh Pemerintah dituangkan dalam sebuah kebijakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem No. P.15/KSDAE-SET/2015. Salah satu yang mendasari penggunaan metode tersebut adalah bahwa METT telah diaplikasikan secara luas di kawasan konservasi di dunia dan diadopsi secara resmi oleh pemerintah di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India dan Bhutan. Menurut Hocking (2015) penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan METT telah dilakukan sebanyak 3.834 kawasan, kemudian berurutan dengan metode Birdlife IBA sebanyak 2.998 kawasan dan RAPPAM sebanyak 1.915.

Terdapat 6 (enam) elemen utama yang dikembangkan dalam penilaian METT, dimana keenam elemen tersebut memiliki peran dalam pengelolaan kawasan, yaitu:

1. **Konteks**; berupa pemahaman umum terhadap kawasan konservasi yang dikelola, status hukum kawasan, nilai penting kawasan, ancaman yang dihadapi, peluang yang tersedia, dan para pihak yang terlibat;
2. **Perencanaan** dalam pengelolaan kawasan, meliputi desain kawasan, perumusan visi dan tujuan pengelolaan, target untuk pelestarian nilai penting dan untuk mengurangi tekanan;
3. **Input** atau alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk mengelola kawasan, meliputi personel/ staf, alokasi anggaran dan peralatan pendukung pengelolaan;
4. **Proses**, berupa kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang dapat diterima;
5. **Output,** baik berupa produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
6. **Outcome,** atau dampak yang mampu dicapai sesuai dengan tujuan pengelolaan.

Elemen pengelolaan yang digunakan dalam metode penilaian MEET mengikuti kerangka kerja umum penilaian yang diberikan oleh WCPA sebagai panduan umum penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di seluruh dunia. Rangkaian keenam elemen pengelolaan tersebut, dapat digambarkan sebagai siklus pengelolaan yang saling berhubungan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (IUCN, 2006)

Keenam elemen tersebut di atas dinilai dengan kriteria yang diukur sebagaimana tabel berikut:

TABEL 1. KRITERIA ELEMEN PENILAIAN YANG DIEVALUASI

Elemen Evaluasi	Penjelasan	Kriteria penilaian	Dokumen Pendukung	Fokus Evaluasi
Konteks	**Dimana kita sekarang?** Penilaian akan arti penting ancaman dan iklim kebijakan	• Arti penting • Ancaman • Kerawanan • Konteks nasional • Mitra	SK Penunjukan, Laporan Patroli	Status
Perencanaan	**Kemana kita hendak pergi?** Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan	• Peraturan dan kebijakan kawasan • Desain dari sistem kawasan konservasi	RPJP, Zonasi/ blok, Renstra/ RTRW	Kesesuaian

Elemen Evaluasi	Penjelasan	Kriteria penilaian	Dokumen Pendukung	Fokus Evaluasi
		• Desain dari kawasan • Perencanaan pengelolaan		
Input	**Apa yang kita perlukan?** Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	• Sumberdaya organisasi • Sumberdaya kawasan	RKA K/L (DIPA), SK Penempatan pegawai, Data inventarisasi barang, Data laporan hasil inventarisasi dan monitoring kawasan	Sumberdaya
Proses	**Bagaimana cara melakukannya?** Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	• Kecocokan proses-proses pengelolaan yang digunakan	Dokumen tata batas,daftar riset, dokumen kerjasama, ijin pemanfaatan, dokumen hasil monev	Efisiensi dan kesesuaian
Output	**Apakah hasilnya?** Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan penhasil produk dan jasa	• Hasil tindakan-tindakan pengelolaan • Jasa dan produk	RPJPn, daftar fasilitas pengunjung	Efektivitas
Outcome	**Apa yang telah kita capai?** Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	• Dampak: efek kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Dokumen kajian ekonomi, peta tutupam lahan, laporan hasil inventarisasi dan monitoring	Efektivitas dan kesesuaian

Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 (tiga) lembar penilaian yaitu:

A. Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi

Lembar ini berisi tentang detil data kawasan konservasi yang akan dinilai, termasuk nama penilai, waktu pelaksanaan, kode WDPA yang dapat diakses melalui *www.unepwcmc*. atau langsung di www.protectedplanet.net , penetapan kawasan secara nasional dan/ atau internasional serta kategori IUCN. Informasi lainnya terkait kepemilikan, luas kawasan, jumlah staf, jumlah anggaran dan informasi nilai penting kawasan serta tujuan pengelolaan kawasan. Pada lembar ini juga dilengkapi informasi keterlibatan para pihak yang terlibat dalam penilaian tersebut. Contoh Lembar 1 terkait Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Lembar Data 1: Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi

Nama, Afiliasi dan detil kontak penanggung jawab penyelesaian METT (termasuk alamat email)				
Tanggal pelaksanaan penilaian				
Nama Kawasan Konservasi				
Kode situs WDPA (dapat ditemukan di www.protectedplanet.net/wdpa)				
Penetapan	Nasional	Kategori IUCN	Internasional (silakan dilengkapi juga pada halaman sebelah)	
Negara				
Lokasi Kawasan Konservasi (provinsi dan jika dimungkinkan juga peta acuan)				
Tanggal penetapan				
Detil Kepemilikan (Silakan di contreng)	Negara	Swasta	Masyarakat	Lainnya
Otoritas Manajemen				
Luas Kawasan Konservasi (Ha)				
Jumlah Staf	Permanen	Temporer		
Anggaran Tahunan (Rupiah) – tanpa anggaran gaji staf	Dana (operasional) rutin	Dana proyek / tambahan lain		
Apakah nilai utama penetapan Kawasan Konservasi				
Tuliskan dua tujuan primer pengelolaan Kawasan Konservasi				
Tujuan Pengelolaan 1				
Tujuan Pengelolaan 2				
Jumlah orang yang terlibat dalam menyelesaikan penilaian				
Termasuk (contreng kotak)	☐ Pengelola Kaw. Konservasi	☐ Staf Kaw. Konservasi	☐ Staf Lembaga Kaw. Konservasi. lain	☐ LSM
	☐ Masy.Lokal p	☐ Donors p	Ahli dari luar p	☐ Lainnya
Harap dicatat jika penilaian dilakukan dengan asosiasi dengan projek tertentu, atas nama suatu organisasi atau donor				

Gambar 3. Lembar Data Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi

B. Data Ancaman Kawasan Konservasi

Lembar ini berisi daftar generik ancaman yang dihadapi suatu kawasan konservasi yang berpotensi merusak nilai penting kawasan. Terdapat 12 kategori jenis ancaman yang diperinci ke dalam 52 pertanyaan. Meskipun data ancaman ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil penilaian, namun bermanfaat untuk menjawab pertanyaan (sebagai bahan justifikasi) dalam lembar penilaian. Untuk mengisi lembar data ini perlu dilakukan identifikasi tingkat ancaman kawasan konservasi dengan mengklasifikasikannya ke dalam kategori tinggi, sedang, rendah atau tidak ada (N/A). Contoh lembar data ancaman kawasan konservasi disajikan pada Gambar 4.

Lembar Data 2. Ancaman Kawasan Konservasi

Silahkan contreng jenis ancaman yang relevan dan memberi keterangan terkait kondisi ancaman.

Tinggi : ancaman-ancaman yang merusak secara serius dan berpontensi tinggi merusak terhadap nilai-nilai penting;
Sedang : ancaman-ancaman yang merusak secara serius dan berpotensi sedang merusak terhadap nilai-nilai penting
Rendah : ancaman-ancaman ada tetapi tidak memiliki dampak serius;
N/A : ancaman-ancaman tidak ada atau tidak berlaku di kawasan konservasi tersebut.

	Jenis Ancaman	Ancaman	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	KETERANGAN
1.	Pembangunan pemukiman dan komersial didalam kawasan konservasi						
	Ancaman dari pemukiman manusia atau penggunaan lahan bukan pertanian dengan dampak (footprint) yang substansial	1.1 Perumahan dan pemukiman					
		1.2 Kawasan komersil dan industri					
		1.3 Infrastruktur wisata dan rekreasi					
2.	**Budidaya pertanian dan perikanan didalam kawasan konservasi**						
	Ancaman dari pertanian dan penggembalaan akibat perluasan dan intensifikasi pertanian termasuk silvikultur, marikultur dan akuakultur	2.1 Budidaya non kayu Tahunan atau Sepanjang Tahun					
		2.1a Perladangan obat terlarang *(drugs)*					
		2.2 Perkebunan kayu dan pulp					
		2.3 Peternakan dan penggembalaan					
		2.4 Akuakultur Laut dan Air Tawar					
3.	**Produksi energy dan pertambangan di dalam kawasan konservasi**						
	Ancaman dari produksi sumber-sumber non-biologis	3.1 Pengeboran minyak dan gas					
		3.2 Pertambangan dan penggalian					
		3.3 Pembangkit energy, termasuk bendungan untuk PLTA dan Panas Bumi					

Gambar 4. Lembar Data Ancaman Kawasan Konservasi

C. Lembar Penilaian

Lembar ini terdiri dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk 3 kolom untuk mencatat detail dari penilaian (kolom skor, komentar/ penjelasan, langkah kedepan). Setiap pertanyaan yang harus diisi dengan menggunakan skor dengan rentang antara 0 (buruk) hingga 3 (sangat baik). Pada beberapa pertanyaan terdapat pertanyaan tambahan yang terkait dengan tema kunci pada pertanyaan sebelumnya untuk memberikan tambahan informasi dan nilai, yaitu pertanyaan nomor 7, 21, 24 dan 30. Setiap pertanyaan kemudian diintegrasikan dengan tujuan pengelolaan, untuk melihat sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan 6 elemen pengelolaan, yaitu: konteks, perencanaan, input, process, output, dan outcome. Rincian setiap pertanyaan dalam masing-masing elemen seperti Gambar 5 dan Lembar Pertanyaan seperti Gambar 6.

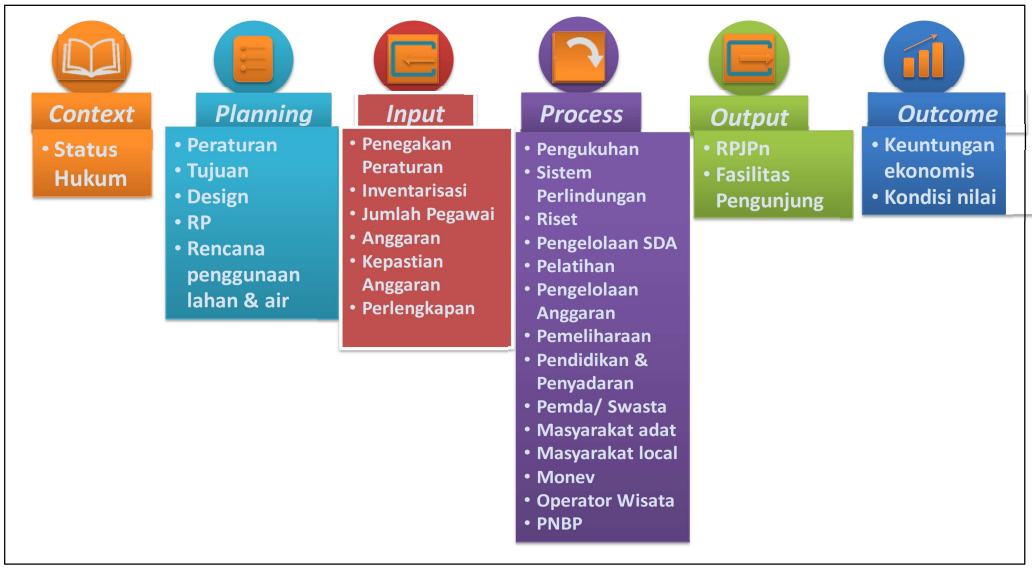

Gambar 5. Rincian Pertanyaan Dalam Enam Elemen Pengelolaan Berdasarkan METT

Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan		Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
1. Status Hukum Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi ini **tidak memiliki dasar** hukum	0			
	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia				
Apakah **kawasan konservasi** ini memiliki status hukum?	**Ada kesepakatan** bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara hukum tetapi prosesnya belum dimulai	1			
	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia. Masih berupa inisiasi pembentukan KK.				
Context	Kawasan konservasi tersebut **dalam proses mendapatkan** status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/ tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat, yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional)	2			
	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia. Dalam proses pengusulan untuk mendapatkan status hukum.				
	Kawasan konservasi tersebut **telah memiliki status hukum formal**	3			
	Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/Menhutbun/Mentan/Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.				
2. Peraturan kawasan konservasi	**Tidak ada peraturan** yang mengatur penggunaan kawasan dan kegiatan di kawasan konservasi	0			
	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan kawasan di KK. Sehingga tidak mungkin disi 0				
Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan kawasan dan kegiatan	**Ada beberapa peraturan** yang mengendalikan penggunaan kawasan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar	1			
	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan kawasan di KK. Sehingga tidak mungkin disi 1				

Gambar 6. Lembar Data Penilaian Kawasan Konservasi

III. TARGET DAN CAPAIAN

A. TARGET 2015-2019

Di dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 salah satu Indikator Kinerja yang harus dicapai adalah "Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia".

Sebagaimana tertuang dalam *milestone capaian sasaran program KSDAE,* peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menjadi 70%, diukur sesuai dengan tingkat ketercapaian IKP secara bertahap. Ukuran-ukuran keberhasilan pencapaian kinerja tersebut akan diverifikasi sebagaimana pemetaan tahapan dalam *milestone* yang disusun, dimana pada tahun pertama (2015) sebatas pada "Tersedianya informasi hasil *self assesment* METT oleh UPT KSDA dan TN," dan pada tahun kedua sampai keempat "Hasil *assesment* METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya", serta pada akhir tahun kelima "260 unit kawasan konservasi memperoleh nilai METT dengan kategori baik (efektif)".

Tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Dokumen Renstra adalah 50 unit kawasan konservasi per tahun untuk tahun 2015-2018 dan 60 unit kawasan konservasi untuk tahun 2019, sehingga total selama 5 tahun periode Renstra akan tercapai 260 unit kawasan konservasi dengan nilai METT minimal 70%.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan target tersebut, berbagai strategi telah dilakukan sebagaimana Gambar 7 berikut:

2015

- Perdirjen KSDAE No. P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019
- Perdirjen KSDAE No. P.15/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian EfektivitasPengelolaan KK di Indonesia
- SK Dirjen KSDAE No. SK.215/KSDAE-KK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengeliolaan KK
- SK Dirjen KSDAE No. SK.234/KSDAE-KK/2015 tentang Penetapan 307 unit KK (ketewakilan fungsi kawasan dan distribusi) sebagai lokasi target capaian
- Penilaian efektivitas pengelolaan KK di 283 KK
- SK Dirjen KSDAE No. SK. 357/KSDAE-SET/2015 tentang penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB

2016

- Trining of Trainer (ToT) Fasilitator METT bersama Marc Hockings dan Fiona Leverington dari IUCN dan University of Queensland
- SK Direktur Kawasan Konservasi No. SK.27/KK/PPKK.1/KSA.1/5/2016 tentang penetapan fasilitator nasional sebanyak 32 orang
- SK Dirjen KSDAE No. 150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tentang Penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB

2017

- Penyegaran fasilitator nasional METT di Bogor
- SK Dirjen KSDAE No. SK.203/KSDAE/SET/KSA.1/5/2017 tentang Penetapan KK tambahan sebagai prioritas untuk peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan 70%
- Bimbingan teknis METT untuk mainstraiming kerangka evaluasi pengelolaan KK di Indonesia Timur di Makassar
- Perdirjen KSDAE No. P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK (Penggunaan METT tidak hanya dilakukan dalam kerangka pencapaian IKK tetapi bagian kegiatan rutin pengelolaan)
- Pemetaan nilai (*midterm*) METT pad 397 kawasan

2018

- Bimbingan Teknis Fasilitator UPT target di Batam
- Submit hasil penilaian METT tahun 2015 ke WDPA IUCN melalui ://pame.protectedplanet.net/
- Penilaian pada kawasan konservasi prioritas

2019

- Menetapkan lokasi terget dan arahan pencapaian IKK peningkatan efektivitas pengelolaan KK tahun 2019 sebanyak 220 KK
- Workshop pembelajaran dalam efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2015-2019
- Bimtek dan Monev Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
- Penilaian pada sejumlah kawasan konservasi
- Verifikasi hasil penilaian METT 2019

Gambar 7. Strategi Pencapaian Target Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan METT Tahun 2015-2019

Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia sebagai panduan untuk melaksanaan penilain telah disusun sejak tahun 2015, dan kemudian seiring dengan situasi dan kondisi yang berkembang, direvisi kembali pada tahun 2017.

Gambar 8. Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen KSDAE No. SK.234/KSDAE-KK/2015 tentang Penetapan 307 unit kawasan konservasi sebagai lokasi target capaian, dapat digambarkan distribusi kawasan berdasarkan fungsinya dari 307 unit kawasan konservasi target tersebut adalah sebagai berikut:

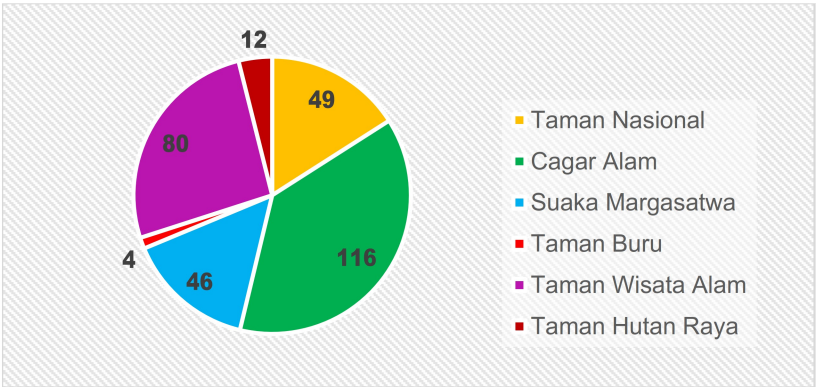

Gambar 9. Distribusi Kawasan Konservasi Target Berdasarkan Fungsi

B. CAPAIAN PER TAHUN 2015-2019

Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan dilakukan pada semua status kawasan konservasi yang ada di Indonesia, mulai dari cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), dan taman hutan raya (Tahura), serta taman buru (TB) yang tersebar di 34 provinsi. Penilaian dilakukan secara bertahap, dan hasil pencapaian sepanjang tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. CAPAIAN 2015

a. Capaian Penilaian

Tahun 2015, merupakan tahun awal pelaksanaan penilaia efektivitas pengelolaan kawasan dilakukan. Oleh kerena itu perlu dilakukan penilaian awal sebagai baseline bagi penilaian-penilaian selanjutnya. Pada awal penilaian dilakukan terhadap 166 unit kawasan konservasi (32 unit TN, 47 unit CA, 13 unit SM, 68 unit TWA, 3 unit Tahura, 3 unit TB). Dari hasil penilaian tersebut diperoleh rentang nilai dari terendah 13% (SM Mubrani – Kaironi dan SM Sidei-Wibain) sampai tertinggi 80% (TN. Gunung Gede Pangrango).

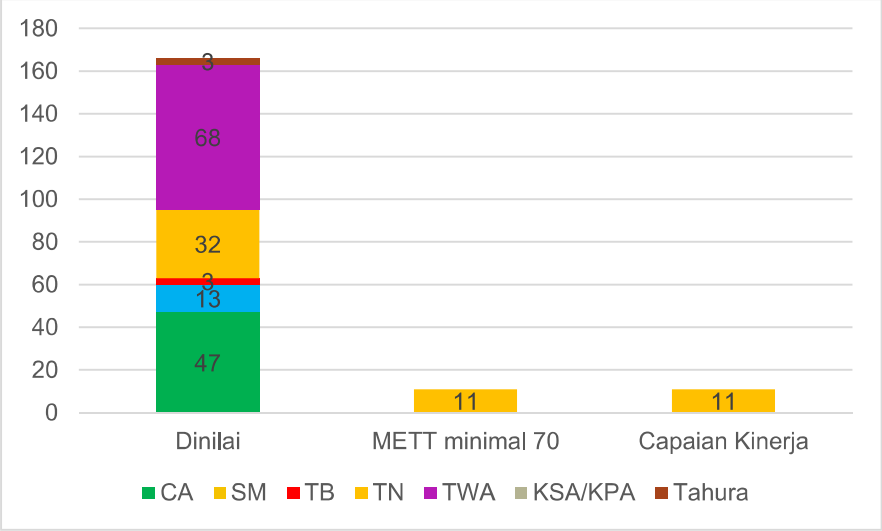

Gambar 10. Capaian Penilaian 2015

Jika melihat target nilai pengelolaan yang harus dicapai adalah minimal 70%, maka hanya terdapat 11 kawasan konservasi yang mencapai nilai tersebut, dan seluruhnya merupakan kawasan taman nasional. Taman nasional yang

mendapatkan nilai pengelolaan minimal 70% disajikan pada Gambar 11 sebagai berikut:

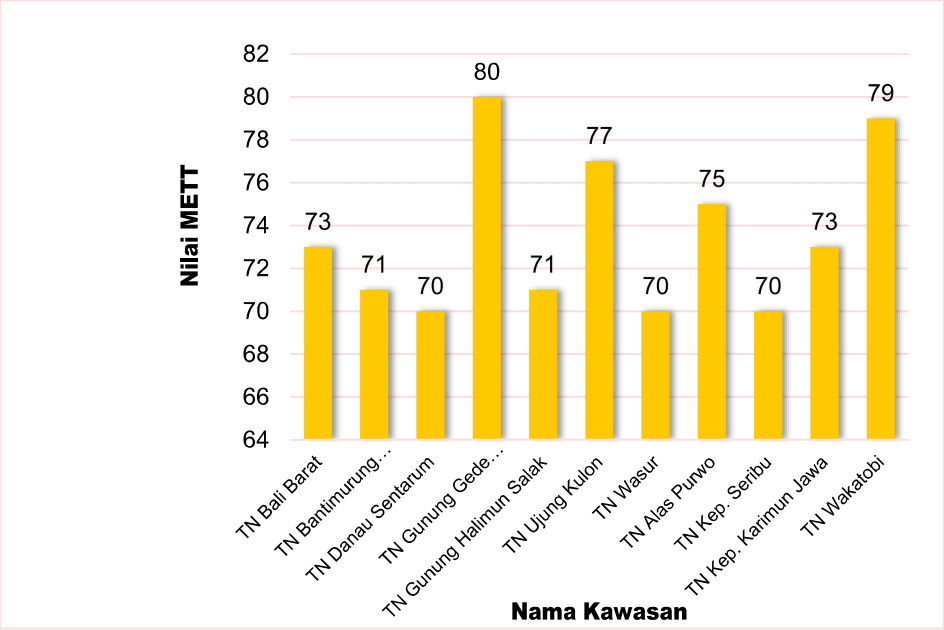

Gambar 11. Taman Nasional Dengan Skor METT ≥70%

b. Capaian Kinerja

Dibandingkan dengan target tahunan yang harus dicapai sebanyak 50 unit kawasan dengan nilai ≥ 70%, maka pada tahun pertama pelaksanaan Renstra ini, hanya 11 unit kawasan atau 22% dari target tersebut yang tercapai. Jika dilihat komposisi kawasan berdasarkan pulau utama, sebanyak 54,5% (atau 6 unit) dari kawasan TN tersebut berada di Pulau Jawa, yaitu TN Gunung Gede Pangrango, TN Halimun Salak, TN Ujung Kulon, TN Alas Purwo, TN Kepulauan Seribu, dan TN Karimun Jawa. Hasil penilaian METT tahun 2015 dari masing-masing kawasan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE No. SK. 357/KSDAE-SET/2015 tentang penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB.

2. CAPAIAN 2016

a. Capaian Penilaian

Pada tahun 2016 dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan pada 15 unit kawasan dan verifikasi ulang terhadap 14 unit kawasan yang dinilai pada tahun 2015 dan memiliki nilai METT < 70%. Dari 29 unit kawasan tersebut meliputi 2 unit CA, 22 unit TN, 1 unit Tahura, dan 4 unit TWA. Hasil penilaian dan verifikasi ulang menyatakan bahwa ke-29 unit kawasan tersebut mendapatkan nilai METT minimal 70% sebagaimana ditargetkan.

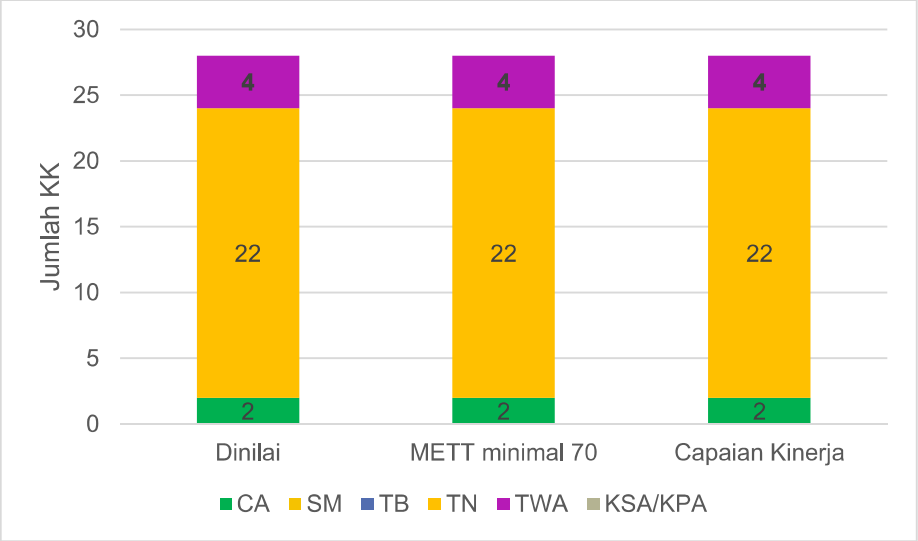

Gambar 12. Capaian Penilaian 2016

b. Capaian Kinerja

Dibandingkan target tahunan sebanyak 50 unit KK dengan nilai METT 70% ke atas, pada tahun 2016 hanya tercapai sebanyak 29 unit atau 58% dari target tersebut. Distribusi hasil penilaian capaian METT 29 kawasan tersebut disajikan pada Gambar 13.

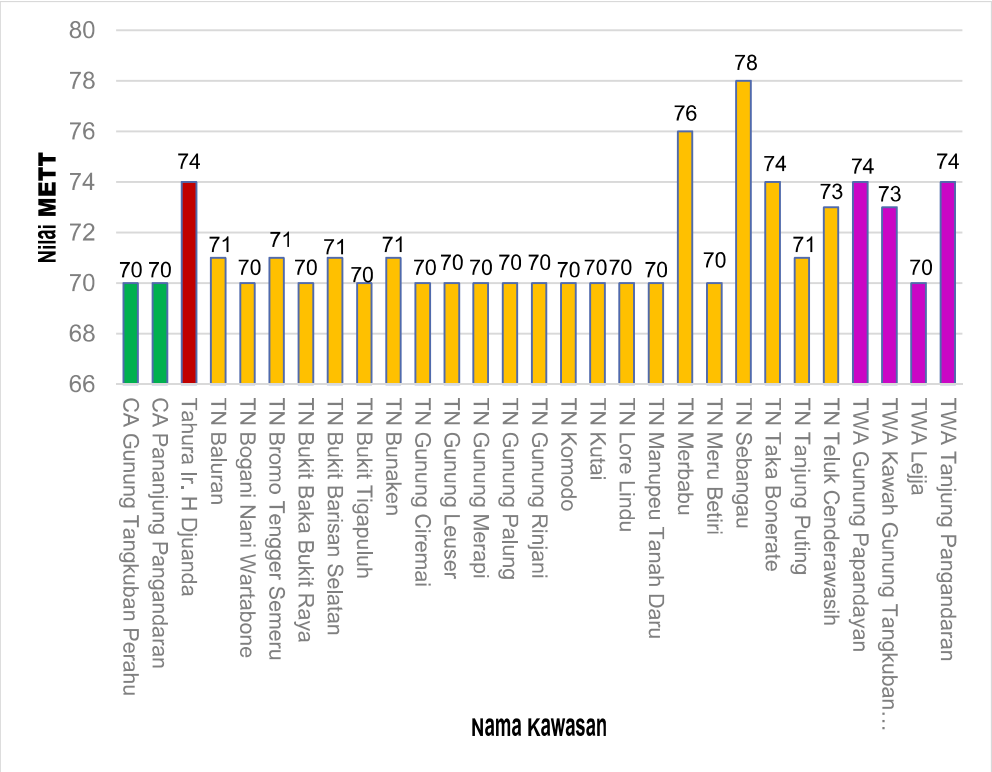

Gambar 13. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2016

3. CAPAIAN 2017

a. Capaian Penilaian

Pada tahun 2017, terdapat **395** unit kawasan yang dilakukan penilaian efektivitasnya, meliputi 140 unit CA, 55 unit SM, 29 unit TN, 100 unit TWA, 7 unit TB, dan 28 unit Tahura. Dari sejumlah kawasan yang dinilai tersebut, 152 unit merupakan penilaian ulang terhadap kawasan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan sisanya sebanyak 243 unit merupakan kawasan yang baru pertama kali dilakukan penilaian.

Hasil penilaian pada kawasan yang baru dinilai pertama kali menujukkan skor antara 16% sampai dengan 77%. Sementara itu untuk kawasan yang telah dilakukan penilaian tahun sebelumnya, 136 unit menunjukkan peningkatan nilai efektivitas, 10 unit menunjukkan penurunan nilai, dan 6 unit cenderung tetap. Secara umum dari seluruh kawasan yang dinilai pada tahun 2017, sebanyak 51 unit mendapatkan nilai capaian METT minimal 70%. Dari jumlah tersebut, 11 unit diantaranya sudah menjadi capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya, dan hanya 40 unit kawasan yang tercatat sebagai capaian tahun

2017. Rincian hasil penilaian METT tahun 2017 berdasarkan fungsi kawasan disajikan pada Gambar 14.

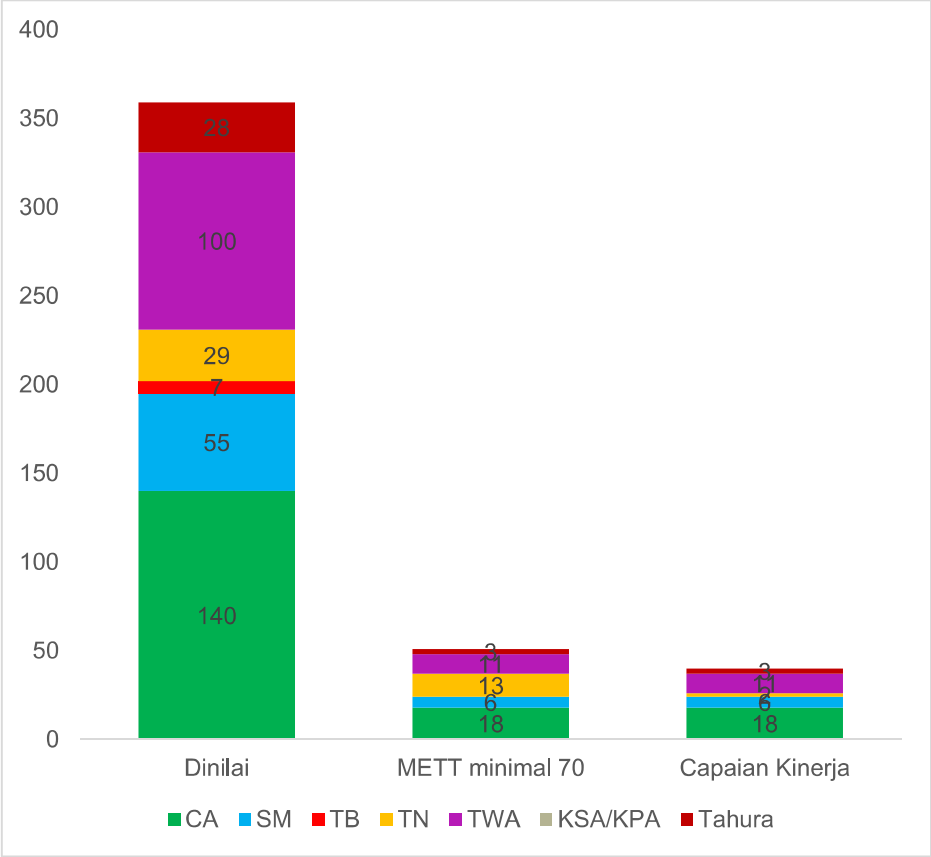

Gambar 14. Capaian Penilaian 2017

b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 jumlah kawasan konservasi dengan nilai METT minimal 70% sebanyak 40 unit, terdiri dari 18 unit CA, 6 unit SM, 2 unit TN, 3 unit Tahura dan 11 unit TWA. Dibandingkan target tahunan yang harus dipenuhi sebanyak 50 unit Kawasan konservasi, maka pada tahun 2017 ini hanya mampu tercapai 80% dari target tersebut. Nama kawasan dan nilai METT dari masing-masing kawasan, disajikan pada Gambar 15.

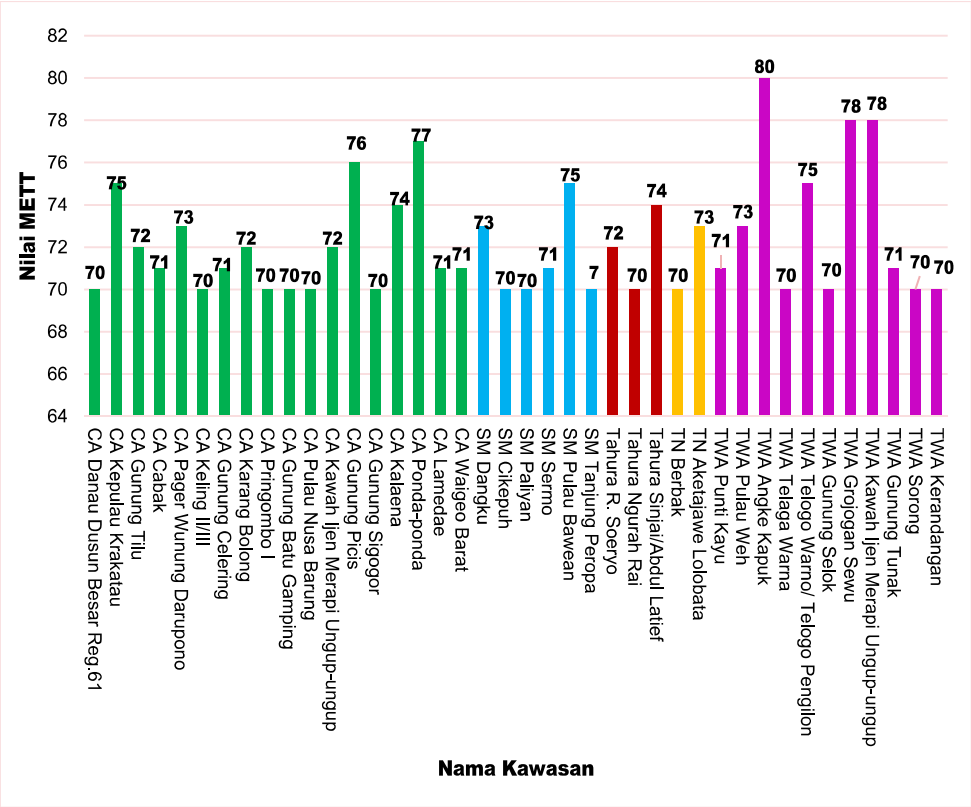

Gambar 15. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2017

4. CAPAIAN 2018

a. Capaian Penilaian

Pada tahun 2018 penilaian efektivitas dilakukan pada 204 unit kawasan konservasi, dimana 1 unit merupakan kawasan konservasi yang baru pertama kali dinilai dan 203 unit kawasan konservasi yang dilakukan penilaian ulangan. Berdasarkan jenis kawasannya, penilaian METT tahun 2018 dilakukan pada 87 CA, 38 SM, 4 TB, 13 TN, dan 62 TWA. Skor yang diperoleh dari hasil penilaian tahun 2018 antara 33% sampai 79%. Dari 203 unit kawasan yang dinilai ulang di tahun 2018, sebanyak 19 unit kawasan mengalami penurunan nilai METT, 7 unit kawasan tetap, dan 177 unit kawasan meningkat. Sedangkan 1 unit kawasan yang baru pertama kali nilai yaitu TWA Bukit Selero-eks PLG KH Isau-isau hanya menghasilkan nilai 68%.

Secara keseluruhan dari 204 unit kawasan tersebut, 88 unit diantaranya telah mencapai hasil penilaian > 70%. Walaupun demikian, sebanyak 13 unit

kawasan telah tercatat sebagai capaian di tahun-tahun sebelumnya, dan 75 unit kawasan menjadi capaian tahun 2018. Rincian hasil penilaian METT tahun 2018 berdasarkan fungsi kawasan disajikan pada Gambar 16.

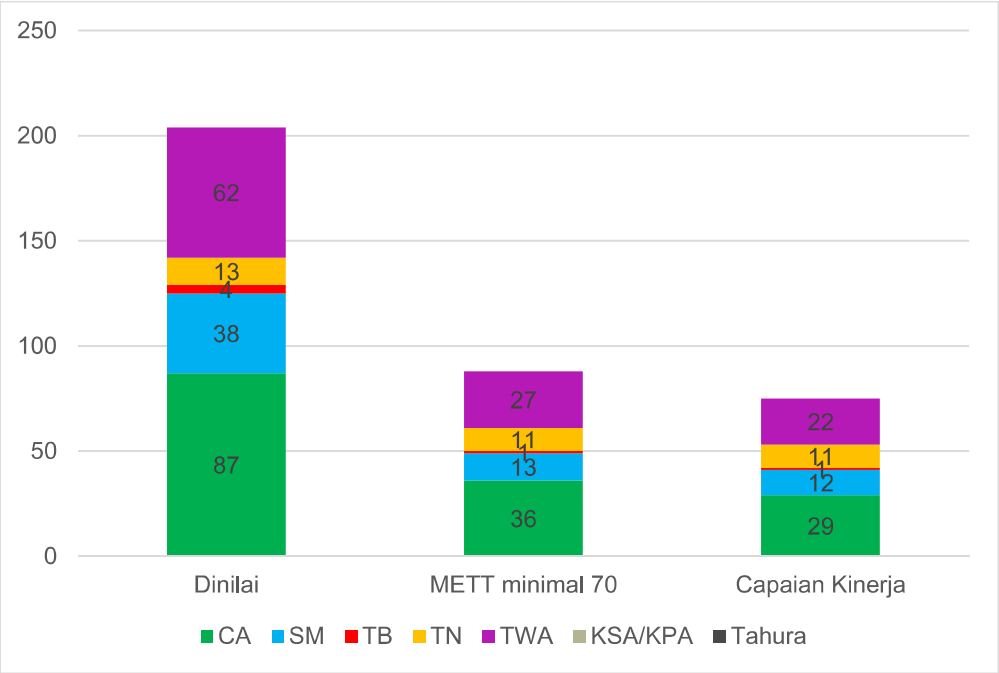

Gambar 16. Capaian Penialaian 2018

b. Capaian Kinerja

Target kawasan dengan nilai METT minimal 70 tahun 2018 adalah sebanyak 50 unit kawasan konservasi. Hasil penilaian tercatat sebanyak 75 unit kawasan konservasi yang terdiri atas 29 unit CA, 12 unit SM, 11 unit TN, 22 unit TWA, dan 1 unit TB. Jika target yang harus dicapai pada tahun 2018 adalah 50 unit kawasan konservasi dengan nilai METT 70%, maka capaian kinerja pada tahun 2019 sudah 150%. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan METT pada 75 unit kawasan tersebut sebagaimana Gambar 17.

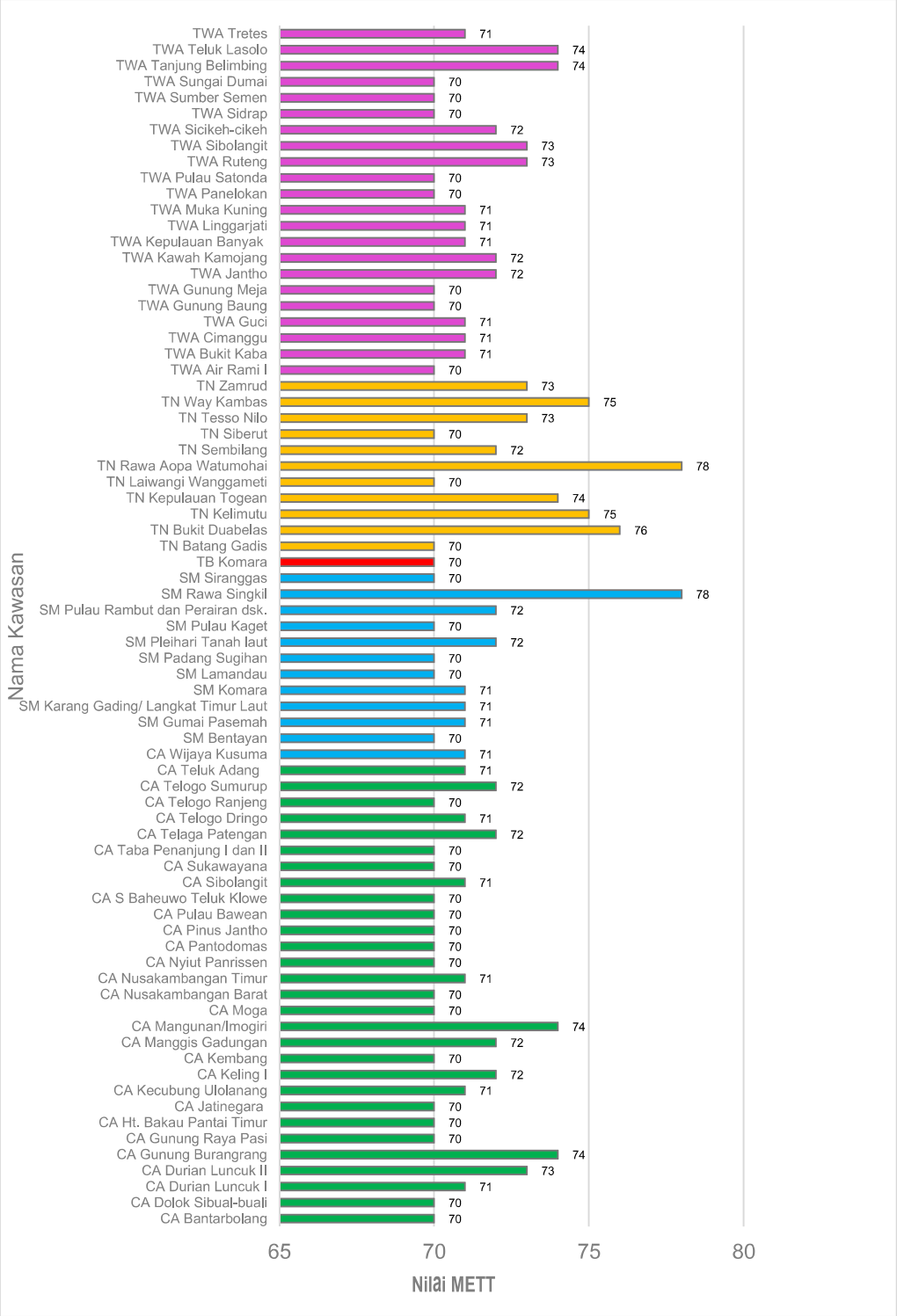

Gambar 17. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2018

5. CAPAIAN 2019

a. Capaian Penilaian

Pada tahun 2019 sebanyak 344 unit kawasan konservasi telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan, meliputi 131 unit CA, 49 unit SM, 34 unit TN, 91 unit TWA, 32 unit Tahura, 5 unit TB dan 2 unit KSA/ KPA. Dari sejumlah kawasan tersebut, 33 unit merupakan kawasan yang baru pertama kali dinilai, dan 311 unit merupakan penilaian ulang. Secara keseluruhan dari penilaian tersebut dihasilkan nilai terendah 12% (Tahura Gunung Lalang-Sumatera Selatan) dan nilai tertinggi 87% (CA Pinus Janthoi-BKSDA Aceh).

Terkait dengan target nilai METT minimal 70%, dari 344 unit kawasan terdapat 198 unit kawasan konservasi yang mencapai hasil penilaian ≥ 70%. Dari jumlah tersebut sebanyak 98 unit telah tercatat sebagai capaian di tahun-tahun sebelumnya, sehingga hanya 100 unit kawasan yang menjadi capaian tahun 2019. Rincian hasil penilaian METT tahun 2019 berdasarkan fungsi kawasan disajikan pada Gambar 18.

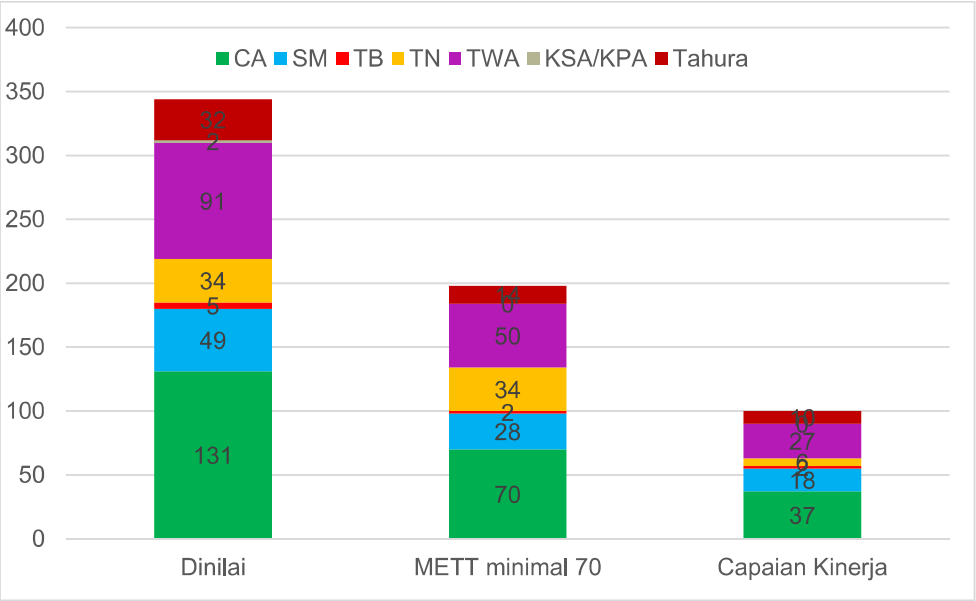

Gambar 18. Capaian Penilaian 2019

b. Capaian Kinerja

Tahun 2019 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Renstra 2015-2019. Target yang harus dipenuhi pada tahun ini sebanyak 60 unit kawasan dengan nilai efektivitas pengelolaan minimal 70%. Namun dengan belum tercapainya

target pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2019 ini seharusnya masih tersisa target sebanyak 105 unit kawasan yang harus ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sehingga 260 unit kawasan mendapatkan nilai METT minimal 70% bisa terwujud.

Dari hasil penilaian yang dilakukan terhadap 344 unit kawasan pada tahun 2019 ini, sebanyak 100 unit tercatat sebagai capaian di tahun tersebut. Berdasarkan fungsinya, ke-100 unit kawasan tersebut terdiri atas 37 unit CA, 18 unit SM, 6 unit TN, 2 unit TB, 10 unit tahura, dan 27 unit TWA. Dengan demikian, jika targetnya adalah 60 unit KK, maka capaian di tahun 2019 ini adalah 166,67%. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan METT pada 100 unit kawasan tersebut sebagaimana Gambar 19.

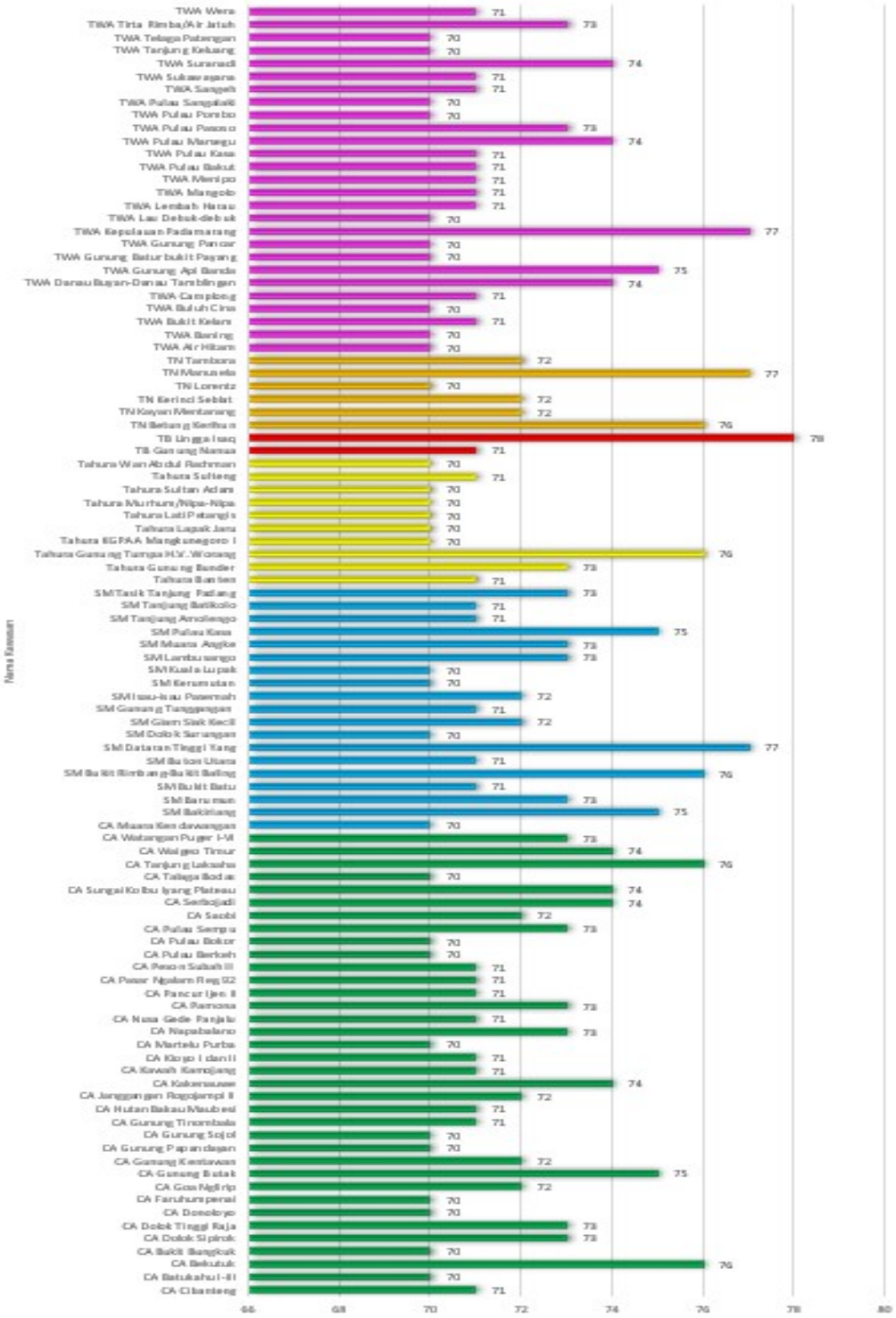

Gambar 19. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2019

Gambar 20. Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di TN Wakatobi

C. RESUME CAPAIAN 2015-2019

1. Capaian Kinerja 2015-2019

Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif diketahui bahwa kisaran nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia 12%-87% dengan nilai rata-rata 65,71% (dari 422 unit kawasan yang sudah pernah dinilai). Sedangkan apabila dihitung dari seluruh kawasan (dari 554 unit kawasan), nilai rata-ratanya menjadi 50,12%, karena masih terdapat 132 unit kawasan yang belum dilakukan penilaian dan dianggap nilainya 0.

Dari rata-rata 422 unit kawasan konservasi (65,71%), sejumlah 164 unit kawasan (38,86%) memiliki nilai efektivitas di bawah rata-rata, dan sisanya 258 unit kawasan (61,14%) nilai efektivitas pengelolaan sudah diatas nilai rata-rata tersebut. Namun jika berdasarkan rata-rata 554 unit kawasan (50,12%) maka sejumlah 373 unit kawasan atau 67,33% sudah memiliki nilai di atas rata-rata, 181 unit kawasan atau 32,67% memiliki nilai dibawah rata-rata tersebut.

Gambaran frekuensi dari capaian nilai efektivitas pengelolaan pada 554 unit kawasan dan di 422 unit kawasan yang dinilai sepanjang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

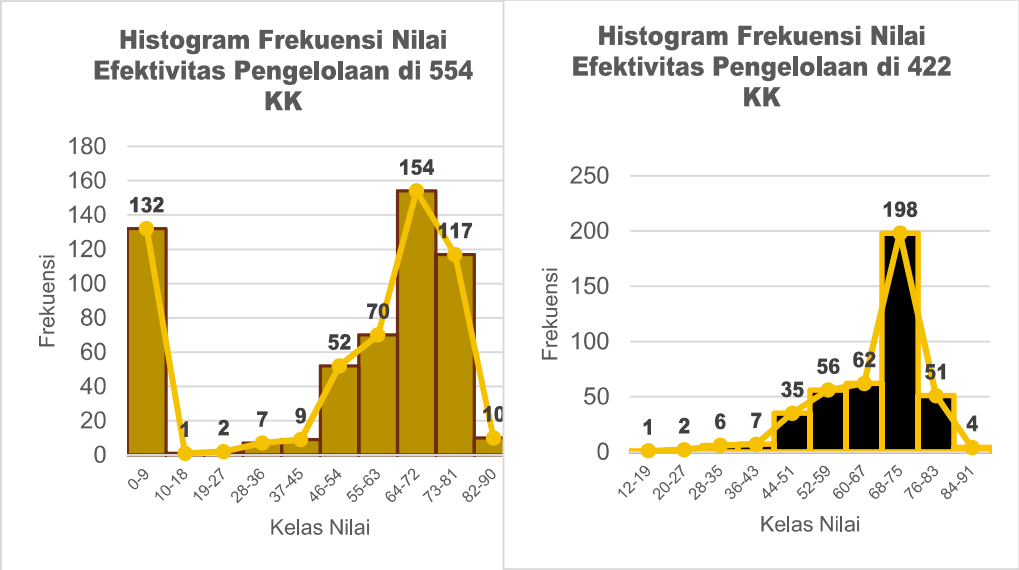

(a) (b)

Gambar 21. Resume Capaian Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2015-2019

2. Capaian per Fungsi Kawasan

Selama 5 tahun periode Renstra 2015-2019, dari 554 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia, total sebanyak 422 unit kawasan telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya. Hal ini berarti 76,17% kawasan telah memiliki nilai efektivitas pengelolaan, dan sisanya sebanyak 132 unit belum memiliki *base line* nilai karena belum pernah dilakukan penilaian.

Kawasan yang belum dilakukan penilaian efektivitas sebagian besar berupa cagar alam (52 unit), kawasan yang belum memiliki fungsi yang jelas atau berstatus KSA/KPA (27 unit) dan kawasan TWA (24 unit). Distribusi fungsi kawasan baik yang sudah dinilai maupun yang belum dinilai, disajikan pada Grafik berikut:

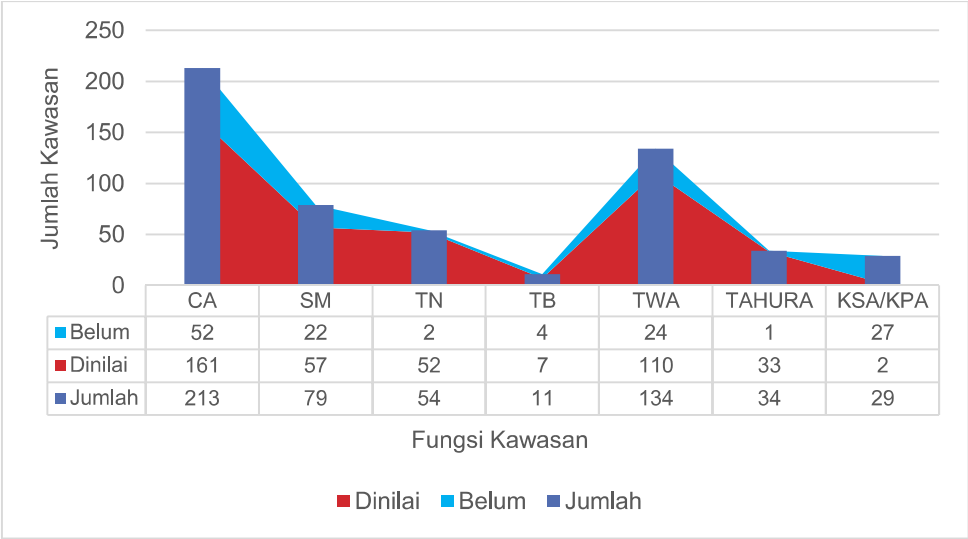

Gambar 22. Kawasan Konservasi yang Sudah dan Belum Dilakukan Penilaian

Capaian peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan dengan nilai minimal 70% setiap tahun selalu mengalami peningkatan, dan yang paling banyak adalah di tahun 2019 yaitu 100 unit kawasan. Gambaran capaian per tahun per fungsi kawasan dapat digambarkan sebagai berikut:

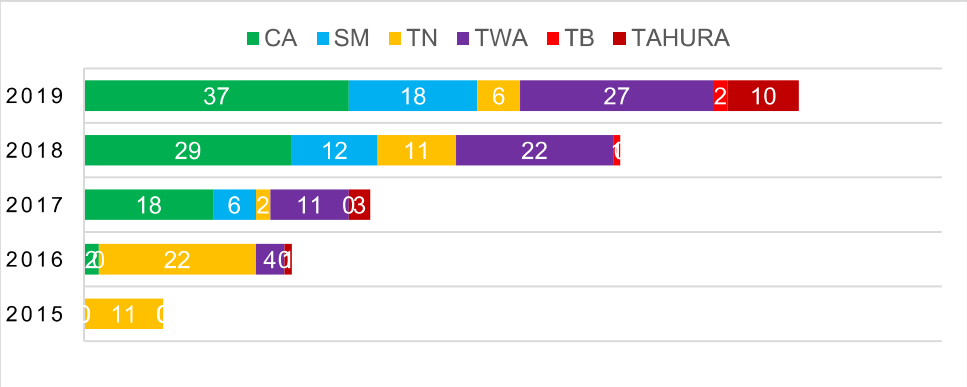

Gambar 23. Capaian per Tahun per Fungsi Kawasan

Jika dibandingkan dengan target tahunan yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019, adalah kawasan dengan nilai efektivitas pengelolaan minimal 70%, sebanyak 50 unit per tahun (kecuali tahun 2019 sebanyak 60 unit), maka hanya tahun 2018 dan 2019 saja yang angka realisasinya telah melebihi target yang ditentukan. Sedangkan tahun 2015, 2016 dan 2017, realisasinya tidak mencapai angka yang ditargetkan. Perkembangan angka capaian kinerja peningkatan efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi dengan nilai minimal 70% disajikan berikut ini.

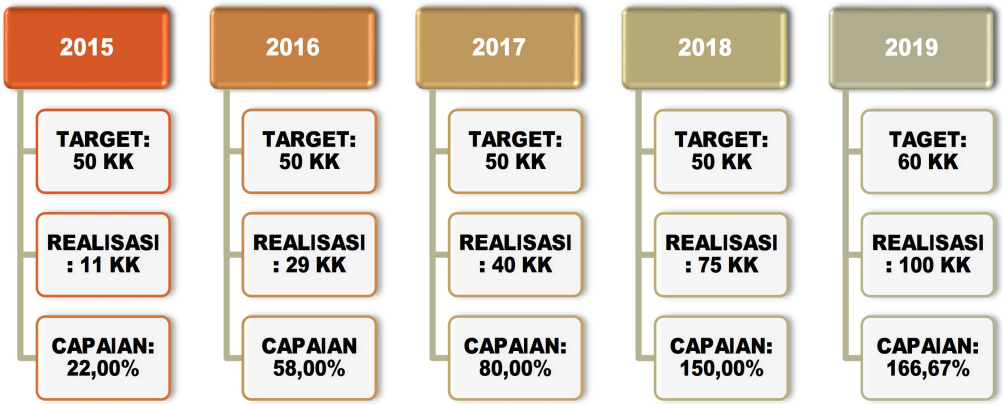

Gambar 24. Capaian Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2015-2019

Secara akumulatif capaian kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi selama 5 tahun tersebut adalah sebesar 98,08%, karena dari target 260 unit kawasan dengan nilai efektivitas pengelolaan minimal 70%, hanya tercapai sebanyak 225 unit. Berdasarkan fungsi kawasan, yang paling banyak adalah CA sejumlah 86 unit, selanjutnya kawasan TWA sebanyak 64 unit, TN sebanyak 52 unit, SM 36 unit, Tahura 14 unit dan TB 3 unit.

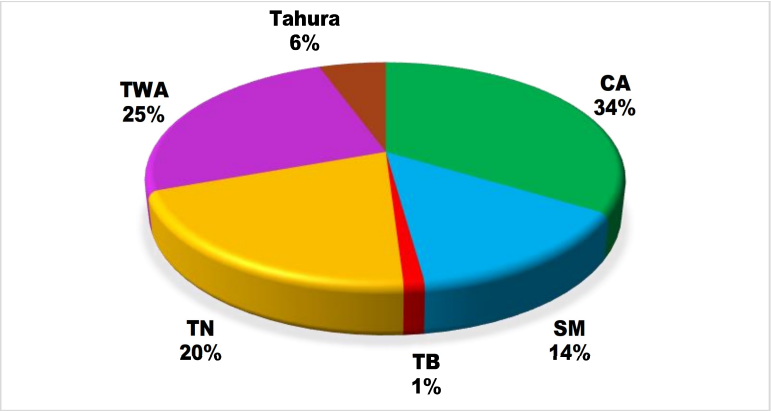

Gambar 25. Capaian METT ≥ 70% Selama Lima Tahun

Gambar 26. Proses Verifikasi Hasil Penilaian METT Oleh Tim Verifikator

3. Capaian per Satker

Berdasarkan pengelolanya, 554 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia dikelola oleh 74 UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, meliputi 48 UPT sebagai pengelola kawasan TN dan 26 UPT KSDA sebagai pengelola kawasan CA, SM, TWA, TB dan KSA/KPA, serta 34 UPT Daerah sebagai pengelola Tahura.

Unit Pelaksana Teknis KSDA dengan jumlah kawasan yang terbanyak adalah Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan jumlah kawasan sebanyak 48 unit, dan yang paling sedikit adalah UPT Balai KSDA DKI Jakarta dengan 4 unit kawasan. Beberapa UPT KSDA juga mengelola kawasan TN karena belum adanya organisasi pengelola, yaitu Balai Besar KSDA Riau mengelola TN Zamrud, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan mengelola TN Gandang Dewata, dan Balai KSDA Sumatera Selatan mengelola TN Gunung Maras. Disamping itu beberapa UPT TN juga memiliki kawasan lebih dari 1 unit, karena adanya penggabungan 2 UPT, yaitu Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Balai TN Berbak Sembilang, dan Balai TN Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti.

Selama periode Renstra 2015-2019, UPT TN dan UPTD telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan pada seluruh kawasannya. Walaupun demikian terdapat 2 unit TN yang belum dilakukan penilaian, yaitu TN Gunung Maras dan TN Gandang Dewata karena saat ini masih menjadi kawasan yang dikelola oleh UPT KSDA. Dari 26 UPT KSDA, hanya 9 UPT yang telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan di seluruh kawasannya, yaitu Balai KSDA Aceh, Balai KSDA Bali, Balai KSDA DKI Jakarta, Balai KSDA Yogyakarta, Balai KSDA Kalimantan Barat, Balai KSDA Kalimantan Timur, Balai KSDA Sulawesi Tengah, Balai KSDA Sulawesi Utara, dan Balai KSDA Sulawesi Tenggara. Sebaliknya Balai KSDA Maluku menjadi UPT yang paling sedikit melakukan penilaian terhadap pengelolaan kawasannya, karena dari 29 unit kawasan yang ada, hanya 6 unit yang telah dilakukan penilaian METT atau 20,69% dari total jumlah kawasan. Jumlah kawasan yang telah dinilai dan belum dinilai efekifitas pengelolaannya dari masing-masing UPT KSDA digambarkan sebagai berikut:

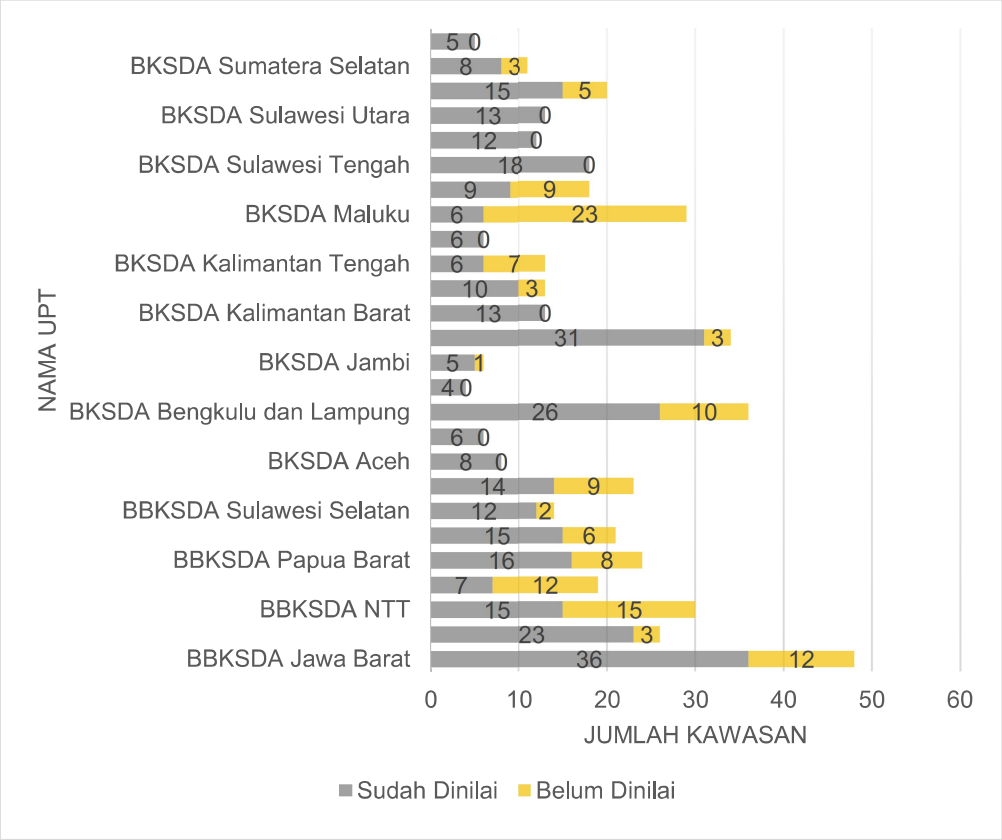

Gambar 27. Kawasan Konservasi pada UPT KSDA yang Sudah Dilakukan Penilaian

Nilai efektivitas pengelolaan dengan METT minimal 70% dari masing-masing UPT KSDA, yang paling banyak adalah di wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah (29 unit), Balai Besar KSDA Jawa Barat (22 unit), Balai Besar KSDA Jawa Timur (18 unit), dan Balai Besar KSDA Sumatra Utara dan Balai KSDA Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 12 unit. Sementara itu, kawasan yang ada di wilayah Balai KSDA Sulawesi Utara dan Balai Besar KSDA Papua, belum ada satupun yang mencapai nilai tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan jumlah kawasannya, seluruh kawasan yang ada di wilayah Balai KSDA DKI Jakarta (4 unit KK) , BKSDA Bali (5 unit KK) dan BKSDA Sulawesi Tenggara (12 unit KK) telah memiliki nilai METT minimal 70, yang berarti pengelolaannya bisa dikatakan efektif. Gambaran selengkapnya jumlah kawasan di masing-masing UPT KSDA yang telah memiliki nilai efektivitas pengelolaan berdasarkan METT minimal 70, disajikan sebagai berikut:

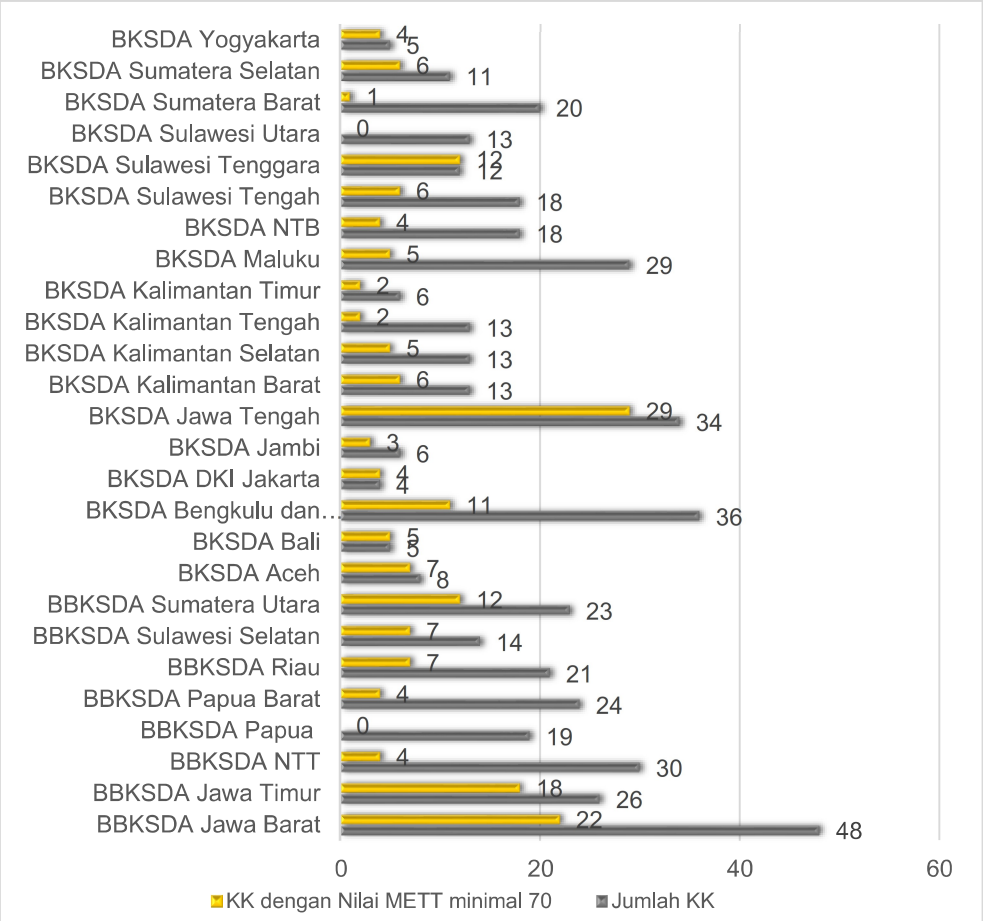

Gambar 24. Kawasan Konservasi dengan Nilai ≥ 70% Pada UPT KSDA

4. Evaluasi Penilaian Per Elemen

Selama kurun waktu 2015-2019 penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dilakukan melalui forum penilaian yang melibatkan internal UPT dan steakholder terkait. Aspek penilaian efektivitas pengelolaan meliputi 30 indikator yang terbagi dalam 6 elemen, yaitu *context*, *planning*, *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Hasil penilaian menunjukan terdapat 4 indikator dengan skor terendah, yaitu:

1) RPJPn: penjabaran teknis opresional RPJP yang memuat rencana kegiatan dan pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/ APBD) dan sumber lain yang tidak mengikat.
2) Masyarakat adat: Pelibatan masyarakat lebih banyak pada konsultasi publik penyusunan blok/ zona dan RPJP. Beberapa UPT telah membentuk forum komunikasi dan pertemuan intensif di tingkat resort.
3) Operator wisata: bersama pengelola menyampaikan nilai-nilai kawasan konservasi kepada pengunjung. Penilaian 2017 tercatat 139 kawasan konservasi belum memiliki kerjasama antara dengan operator wisata. Hubungan antara UPT dan operator masih terbatas pada aspek administrasi.
4) Iuran/ pungutan: masuk dalam skema keuangan negara dan tidak secara langsung dapat berkontribusi kepada kawasan. Iuran atau pungutan sangat tergantung dari kemampuan pengelola mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan.

Beberapa catatan proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi per elemen adalah sebagai berikut:

a. Elemen context

Elemen ini terdiri dari satu indikator, yaitu status hukum kawasan konservasi. Elemen ini secara umum mendapatkan nilai maksimal dikarenakan seluruh kawasan konservasi telah memiliki status penunjukan. Isu strategis pada elemen ini adalah kawasan konservasi memiliki kekuatan hukum yang beragam; ada kawasan konservasi yang masih dalam tahap penunjukan, SK Gubernur, bahkan masih menggunakan *Besluit* Gubernur Hindia Belanda. Masih ada permasalahan batas di lapangan dan berkonflik dengan pihak ketiga.

b. Elemen planning

Elemen ini terdiri dari 5 indikator, yaitu: peraturan, tujuan pengelolaan, desain kawasan, rencana pengelolaan, dan rencana penggunaan lahan dan air. Selama periode 2015-2019 elemen ini menunjukkan peningkatan nilai yang

paling tinggi dibandingkan 4 elemen lainnya. Isu strategis elemen ini adalah masih terdapat kawasan konservasi yang dikelola tanpa tujuan atau target yang jelas dan terukur. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketersediaan dokumen perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kawasan. Sampai saat ini masih banyak kawasan yang belum memiliki dokumen rencana pengelolaan tersebut. Dari 554 unit kawasan konservasi, yang telah memiliki dokumen rencana pengelolaan hanya 311 unit kawasan atau 56,14% saja. Ini menggambarkan kondisi pengelolaan kawasan konservasi tidak dikelola dengan perencanaan yang baik.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, juga harus memperhatikan perencanaan tata ruang di sekitarnya. Bagaimanapun pengelolaan kawasan konservasi ini tidak terpisahkan dari pengelolaan wilayah disekitarnya. Sebagai bagian dari sebuah ecoregion, penggunaan lahan dan air di sekitar kawasan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses-proses ekologis yang terjadi di dalam kawasan konservasi.

Pada tatanan Rencana Tata Ruang Nasional seluruh kawasan konservasi telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional, namun pada prakteknya rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota seringkali tidak mendukung kelestarian kawasan konservasi. Pembangunan kawasan permukiman, maupun pertanian/perkebunan di sekitar kawasan konservasi seringkali tidak mempertimbangkan aspek lain seperti kebutuhan koridor satwa bagi beberapa jenis satwa liar. Apalagi saat ini desain (luas, bentuk, lokasi, konektivitas) sebagian kawasan konservasi belum ideal untuk menjalankan fungsinya, sehingga dalam pengelolaannya dibutuhkan kerjasama dengan pemilik atau pengelola lahan di sekitarnya agar eksistensi kawasan tidak terganggu.

c. Elemen input

Elemen ini terdiri dari enam indikator, yang terkait alokasi sumber daya (apa yang kita perlukan). Isu strategis masing-masing indikator pada elemen ini antara lain:

- *Penegakan peraturan*. Instrumen penegakan hukum sudah ada namun terkendala dalam kapasitas staff dan anggaran dalam implementasinya.
- *Inventarisasi.* Sebagian kawasan tidak mengetahui rona/kondisi awal kawasan atau tujuan pengelolaan sehingga sulit menentukan arah pengelolaan dan akhirnya tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kondisi nilai-nilai kawasan.

- *Jumlah pegawai.* Distribusi sumber daya manusia tidak merata atau sesuai kebutuhan pengelolaan tiap kawasan (secara kualitas dan kuantitas). Aspek luas dan jumlah kawasan, seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan jumlah pegawai di setiap UPT. Untuk UPT KSDA, selain mengelola kawasan, tugas dan fungsinya juga mengelola peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayahnya masing-masing. Khusus pada pengelolaan tahura tidak sedikit yang masih dikelola oleh dinas yang memiliki tugas dan fungsi lebih dari satu bidang, sehingga seringkali dalam pengelolaan tahura hanya dilakukan oleh jumlah personil yang terbatas.

  Selain jumlah personil, komposisi personil di tingkat tapak juga menjadi salah satu kendala bagi pengelolaan kawasan yang baik. Terkadang satu kawasan didominasi oleh tenaga pengamanan (Polhut), namun tidak didukung dengan tenaga teknis (PEH) dan administrasi yang memadai, sehingga kegiatan pengelolaan menjadi tidak dapat optimal.

- *Anggaran dan Kepastian Anggaran*. Jumlah anggaran masih minim dan perencanaan anggaran pada UPT KSDA sebagian tidak berbasis kawasan namun berdasarkan resort atau seksi wilayah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian pada kegiatan-kegiatan prioritas yang penting pada masing-masing kawasan
- *Perlengkapan.* Pengadaan sarana dan prasarana tidak berdasarkan analisa kebutuhan pengelolaan (tidak tepat sasaran). Sebagian pengelola kawasan konservasi tidak memiliki prosedur standar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana yang dimiliki (barang bergerak maupun barang tidak bergerak).

d. *Elemen process*

Dari 30 indikator penilaian efektiviitas dengan menggunakan perangkat METT, pada elemen process terdapat 14 indikator sendiri. yaitu: pengukuhan(demarkasi); sistem perlindungan; riset; pengelolaan sumberdaya; pelatihan pegawai; pengelolaan anggaran; pemeliharaan perlengkapan; pendidikan dan penyadartahuan; pemerintah dan swasta di sekitar; masyarakat adat; masyarakat lokal; monitoring dan evaluasi; operator wisata komersil. Beberapa isu strategis pada elemen ini adalah sebagai berikut:

- Sistem perlindungan kawasan relatif masih lemah. Kehadiran petugas dilapangan masih sering dilatari dalam skema kegiatan reaktif (represif), sedangkan kegiatan pre-emtif dan preventif belum optimal juga dengan skema pelibatan masyarakat dan stakeholder disekitar kawasan.

- Pengelolaan kawasan saat ini belum seluruhnya berbasis keilmuan. Data dan informasi tidak tersedia secara lengkap (komprehensif) dan sistematis (*road map* penelitian tidak ada).
- Pengelolaan data dan informasi tidak tersedia dan/ atau tidak dapat diakses untuk menunjang pengambilan keputusan.
- Kegiatan pengelolaan kawasan masih berfokus di dalam kawasan. Penguatan pengetahuan dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan disekitar kawasan baru dilakukan disebagian kawasan, dan dalam kegiatan tertentu saja, misalnya konsultasi publik (*hanya memberikan saran, namun tidak ikut memutuskan suatu kebijakan*). Masyarakat lokal seharusnya dilibatkan dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kondisi karakteristik ekonomi, sosial dan budaya. Kesadaran pengelola kawasan bahwa kawasan tidak dapat dikelola sendiri dan butuh keterlibatan para pihak termasuk masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan kawasan sehingga tidak menjadi beban tunggal UPT..
- Pola pengelolaan yang hanya berfokus pada kawasan kelola (*one-site minded*) harusnya berubah menjadi pengelolaan kawasan berbasis lanskap.
- Peran operator wisata di dalam pengelolaan kawasan konservasi masih belum optimal. Sejauh hubungan yang terjalin masih terbatas pada administrasi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan aktivitas wisata di kawasan konservasi. Padahal seharusnya operator wisata tidak hanya terbatas pada *tour guide* saja, namun melingkupi: hotel, transportasi, interpreter, *travel agent*. Operator wisata dalam hal ini juga termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang berkembang di sekitar kawasan konservasi.
- Pengukuhan (dermakasi) kawasan. Konflik kerap terjadi di kawasan yang berbatasan dengan permukiman atau kebun masyarakat. Batas kawasan yang jelas saja ternyata tidak cukup, namun juga butuh pengakuan dari para pihak. Pada beberapa lokasi konflik ini dapat diselesaikan dengan sosialisasi batas kawasan disertai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

e. Elemen output

Elemen ini terdiri dari dua indikator, yaitu Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan fasilitasi pengunjung. Berdasarkan analisa hasil penilaian, elemen ini mendapatkan skor terendah karena sebagian besar kawasan konservasi tidak menyusun/ tidak mempunyai RPJPn per tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) per

10 tahun. Pemahaman pengelola kawasan terhadap dokumen RPJPn sama dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) masih kerap terjadi, sehingga dokumen tersebut tidak disusun.

Indikator lain yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas pengunjung. Fasilitas yang ada pada kawasan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan wisata belum cukup menyediakan fasilitas wisata yang memadahi baik dari jumlah maupun kualitasnya, sehingga yang tejadi fasilitas wisata ini masih jauh dari standar sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi, dan kenyamanannya. Pengelola kawasan perlu membuat rencana detail pengelolaan wisata baik kebutuhan jenis, jumlah maupun kualitas fasilitas wisata yang sesuai dengan karakteristik kawasannya

f. Elemen *outcome*

Elemen ini terdiri dari dua indikator, yaitu keuntungan ekonomis kawasan konservasi, dan kondisi nilai penting kawasan. Kedua indikator tersebut menjadi perhatian bagi pengelola kawasan, dimana pengelolaan kawasan konservasi selain berkontribusi pada lestarinya nilai-nilai penting kawasan, namun juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dalam bentuk manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan kosnervasi. Isu utama elemen ini adalah sebagian besar kawasan konservasi belum optimal memberikan manfaat ekonomi langung bagi masyarakat sekitar dan kondisi nilai penting kawasan cenderung menurun jika dibandingkan saat penunjukan kawasan. Terdapat beberapa contoh kawasan yang telah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat disekitar kawasan seperti di TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Kelimutu, TWA Sangeh, dan Tahura Djuanda.

D. ANCAMAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI

Pada penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan METT, salah satu aspek penilaian (pada lembar kedua) adalah menyangkut ancaman kawasan konservasi. Terdapat 12 kategori jenis ancaman yang diperinci ke dalam 52 pertanyaan yang menggambarkan jenis ancaman, yang dinilai dengan sistem *scoring*, berdasarkan klasifikasi dalam kategori tinggi (score 3), sedang (score 2), rendah (score 1) atau tidak ada (N/A).

Dari 422 unit kawasan konservasi yang telah dilakukan penilaian sepanjang tahun 2015-2019, hanya 363 unit kawasan yang mempunyai data series ancaman (tahun 2015, 2017, 2018, 2019), sehingga analisis yang dilakukan menggunakan data dari sejumlah kawasan tersebut.

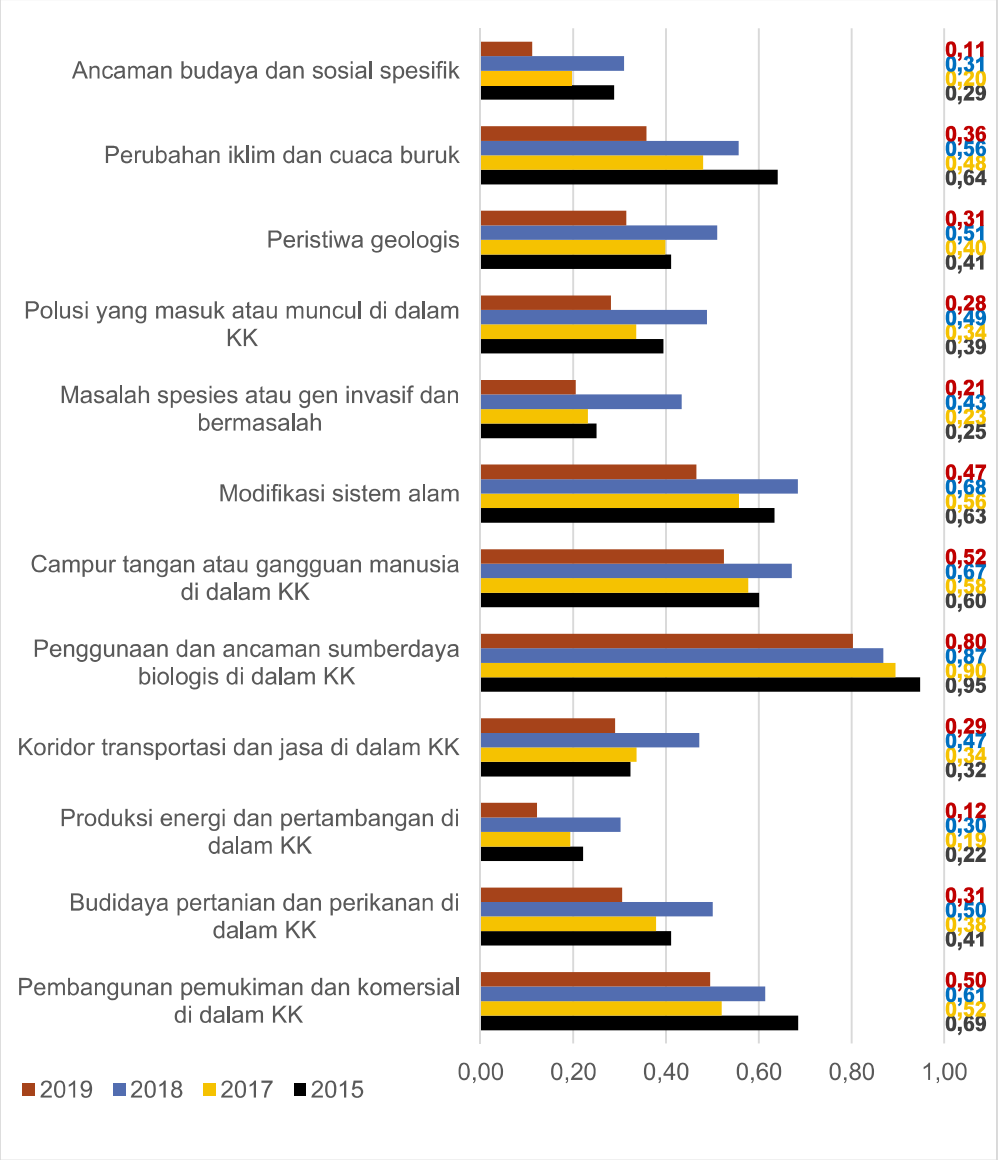

Gambar 25. Kategori Ancaman di Kawasan Konservasi

Dari 12 kategori ancaman di kawasan konservasi, terdapat 4 kategori ancaman dominan yang hampir ditemui di setiap tahun di kawasan konservasi adalah:

1) Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis, yaitu ancaman dari penggunaan konsumtif sumberdaya biologis "liar" termasuk efek pemanenan yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk perburuan atau pengendalian spesies tertentu seperti perburuan dan pembunuhan satwa.

2) Campur tangan atau gangguan manusia, yaitu ancaman dari kegiatan manusia yang merubah, menghancurkan, atau mengganggu habitat dan spesies yang diasosiasikan dengan penggunaan nonkonsumtif sumberdaya biologis
3) Modifikasi sistem alam, yaitu ancaman dari kegiatan lain yang mengkonversi atau merusak habitat atau merubah fungsi ekosistem, dan
4) Pembangunan pemukiman dan komersial di dalam KK, yaitu ancaman dari pemukiman manusia atau penggunaan lahan bukan pertanian dengan dampak (*footprint*) yang substansial.

Jika dilihat *trend*-nya setiap tahun, ke-12 kategori ancaman tersebut cenderung menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan semakin intensifnya kegiatan patroli dan pemantauan terhadap ancaman di lapangan, sehingga aktivitas ilegal yang terjadi di dalam kawasan konservasi dan berpotensi mengganggu kawasan dapat ditekan.

Dari 12 kategori ancaman tersebut, jika dilihat secara lebih detail terdapat 52 jenis ancaman yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Dari hasil analisis data ancaman di 363 unit kawasan konservasi yang melakukan penilaian METT tahun 2015-2019, diperoleh gambaran sebagai berikut:

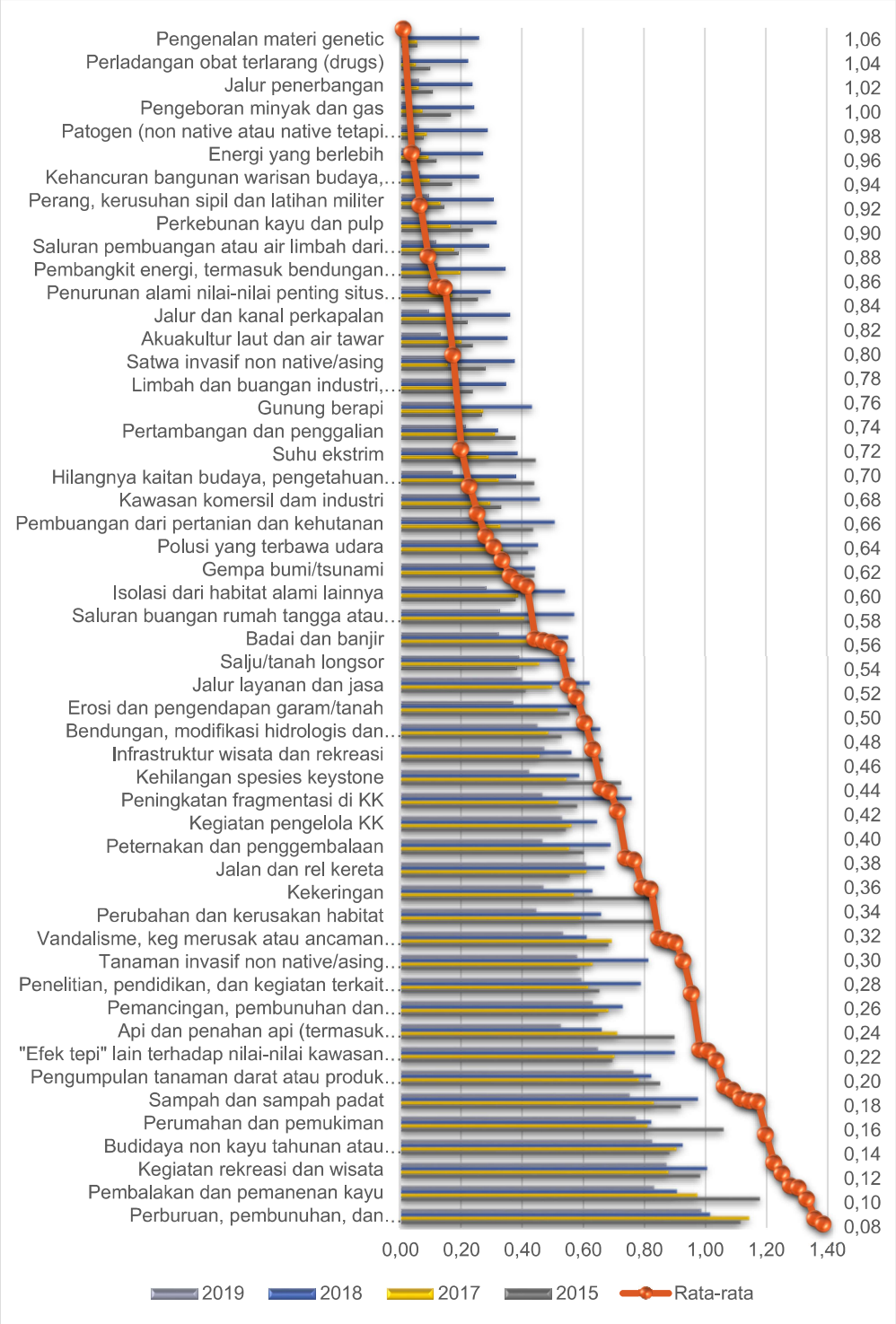

Gambar 26. Jenis Ancaman di Kawasan Konservasi

Dari 52 jenis ancaman yang terdapat dalam penilaian METT, diketahui bahwa ancaman yang paling dominan terjadi di kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

1. Perburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat

   Selama kurun waktu 2015-2019, terdapat unit 289 kawasan konservasi yang dilaporkan terdapat aktifitas perburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat pada berbagai tingkatan/scala ancaman, mulai rendah sampai dengan tinggi. Selain karena harga jual satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang mahal (gading, cula, kulit, dll), adanya konflik antara manusia dan satwa liar juga menjadi penyebab tingginya jenis ancaman ini di sejumlah kawasan. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar sehingga menyebabkan besarnya ancaman terhadap keberadaan satwa liar tersebut.

   Dibeberapa kawasan pemasangan jerat satwa masih sering dijumpai di lapangan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan bahaya sendiri. Satwa yang terkena jerat bisa yang mana saja, bahkan mungkin yang bukan menjadi sasaran, karena setiap satwa yang melalui lokasi pemasangan jerat berpotensi besar terkena perangkap tersebut. Akibatnya satwa dapat terbunuh atau mengalami luka yang bisa berakibat pada kematian. Saat ini beberapa kawasan yang rawan aktifitas perburuan dan pemasangan jerat seperti itu, mulai dilakukan patroli dalam rangka operasi jerat yang bertujuan untuk membersihkan jerat-jerat yang terpasang dalam kawasan hutan dan sekitarnya. Ini dilakukan untuk meminimalisir kematian satwa liar, serta pencegahan perburuan.

Gambar 27. Perburuan Satwa Liar di TN Kerinci Seblat

2. Pembalakan dan pemanenan kayu

Aktivitas pembalakan hutan ilegal dan pemanenan kayu secara liar saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan serta hidup manusia, termasuk yang terjadi di kawasan konservasi. Berdasarkan data ancaman yang dikumpulkan selama tahun 2015-2019, tercatat sebanyak 263 unit kawasan dilaporkan terjadi aktivitas illegal ini.
Selain dapat mengganggu peran dan fungsi penting kawasan hutan, menimbulkan bencana longsor, banjir, kegiatan ini juga berakibat pada rusak atau hilangnya habitat berbagai jenis satwa liar, sehingga dapat mengancam populasi satwa yang hidup didalamnya.

Pelaku kegiatan pembalakan dan pemanenan kayu di kawasan konservasi, bisa masyarakat sekitar kawasan ataupun yang tinggal jauh dari kawasan, atau pemilik modal/perusahaan yang sengaja menebang pohon di luar area konsesiya. Oleh karena itu, kesiapsiagaan petugas untuk melakukan patroli pengamanan, serta melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan lainnya menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk meminimalisir ancaman ini.

Gambar 28. Ilegal Logging Di Tahura Bukit Soeharto

3. Kegiatan rekreasi dan wisata

Beberapa lokasi kawasan konservasi memang memiliki keindahan alam yang unik, sehingga menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pun banyak dilakukan untuk menunjang kegiatan wisata alam ini, sehingga dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi.

Aktivitas rekreasi dan wisata alam ini disatu sisi memang memberikan manfaat yang besar, khususnya terhadap penerimaan negara (PNBP sektor wisata) dan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, namun disisi lain juga menjadi ancaman bagi pengelolaan kawasan. Ancaman terbesar dari kegiatan ini karena dapat mengubah, menghancurkan, atau mengganggu habitat dan spesies tumbuhan dan satwa liar yang hidup di kawasan konservasi tersebut. Dari hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, terdapat sejumlah 265 unit kawasan konservasi yang mencatatkan terjadinya ancaman dari kegiatan rekreasi dan wisata. Oleh karena itu tetap dibutuhkan kehati-hatian dan perencanaan yang baik, dalam pengembangan wisata alam di kawasan konservasi, untuk meminimalkan dampak dan ancaman terhadap kawasan.

Gambar 29. Kegiatan Wisata Alam di TN Gunung Merapi

4. Budidaya non kayu tahunan atau sepanjang tahun
   Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi, menjadi salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian semua pihak. Kebutuhan akan lahan dan sumberdaya lainnya semakin meningkatkan interaksi masyarakat tersebut ke dalam kawasan. Salah satu contoh yang banyak dijumpai di kawasan konservasi adalah adanya budidaya/ penanaman rumput dan tanaman pakan ternak lainnya, budidaya kopi, cengkeh, dll. Dari hasil pendataan tercatat sejumlah 231 unit kawasan konservasi yang memiliki ancaman adanya budidaya non kayu tahunan atau sepanjang tahun tersebut, sehingga kedepan diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi ancaman tersebut agar tidak semakin meluas dan mengganggu eksistensi kawasan.

Gambar 30. Kebun Kopi di Dalam Kawasan TN Kerinci Seblat

IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya bertujuan untuk mengingatkan dan mengevaluasi kembali upaya yang telah dilakukan dalam mengelola kawasan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan, mandat pengelolaan dan nilai penting kawasan tersebut. Konsep pengelolaan *Resort-Based Management* (RBM) dengan prinsip: kehadiran petugas di lapangan, mengenali potensi kawasan, menyelesaiakan permasalahan kawasan, dan membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar kawasan, dan stakeholder lainnya juga menjadi salah satu bagian penting dari proses penilaian efektivitas pengelolaan.

Berdasarkan analisa terhadap kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dari tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan selama ini, belum berpengaruh langsung terhadap pengelolaan kawasan konservasi di lapangan. Menjadi catatan penting bahwa penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah salah salah satu IKU Kementerian LHK yang ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE. Evaluasi terhadap penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan metode METT dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: 1) Metode dan mekanisme penilaian; 2) Manajerial pengawalan; dan 3) Tindak lanjut hasil penilaian. Masing-masing pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. EVALUASI METODE DAN MEKANISME PENILAIAN

a. Dokumen verifikasi seringkali tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga dapat menghambat pelaksanaan penilaian. Padahal proses penyiapan data dan informasi ini (termasuk dokumen-dokumen perencanaan dan laporan kegiatan), seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses penilaian itu sendiri. Data dan informasi terkait dengan pengelolaan menjadi dasar bagi forum dalam menentukan nilai.
b. Belum adanya standar keikutsertaan stakeholder dalam proses penilaian. Padahal penilaian efektivitas pengelolaaan kawasan dengan METT seharusnya dilakukan secara partisipatif. Oleh karena itu perlu memastikan kehadiran pengelola (balai, seksi dan resort) beserta parapihak (pemda, NGO/ LSM, masyarakat, akademisi) untuk turut serta dalam proses penilaian sehingga diharapkan hasilnya lebih obyektif.

c. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan metode METT masih berorientasi pada nilai 70 sebagai indikator efektivitas, sehingga seringkali dianggap sebagai nilai "keramat" yang terkesan dipaksakan pada proses penilaian.
d. Standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang dikelola UPT KSDA dan UPTD (Tahura) masih sama. Padahal kawasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan karakteristik kawasan dan pengelolaan yang beragam. Hal yang menjadi catatan khusus dalam proses penilaian adalah bahwa kondisi ideal di taman nasional tidak bisa diterapkan pada UPT KSDA, apalagi dengan begitu banyak kawasan yang dikelola dan dengan jumlah stakeholders yang relatif lebih banyak, serta anggaran dan ketersediaaan SDM yang masih terbatas.
e. Meskipun telah diterbitkan pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui Peraturan Dirjen KSDAE, namun dalam pelaksanaannya tingkat pemahaman dan perspektif para fasilitator tidaklah sama, tergantung latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing fasilitator.
f. Keterkaitan antar lembar penilaian METT belum optimal diekspolasi. Lembar Data 1 dan Lembar Ancaman berisi gambaran umum kawasan yang akan dinilai. Lembar tersebut seharusnya dapat menjadi salah satu verifikator untuk memberikan penilaian atas beberapa pertanyaan, khususnya yang terkait dengan ancaman dan potensi kawasan. Saat ini lembar ancaman dengan lembar penilaian tidak saling berkaitan, sehingga seringkali fakta di lapangan ancaman tinggi tapi nilai METT tinggi.
g. Dibutuhkan konsistensi jawaban dalam penilaian METT. *Framework* METT yang terdiri dari 6 (enam) elemen dan mewakili pengelolaan kawasan konservasi. Namun indikator masing-masing elemen dirasa belum proposional dimana pembobotan dan enam elemen belum mencerminkan proses penilaian, yaitu input, proses dan *output/ outcome*
h. Beberapa kriteria untuk masing-masing pertanyaan/ isu sudah disesuaikan dengan kondisi pengelolaan di Indonesia, namun masih dirasa perlu untuk lebih mendetailkan dan menambahkan keterangan-keterangan agar lebih mudah dipahami. Bias terhadap jawaban pertanyaan masih cukup tinggi, karena penilaian seringkali berdasarkan persepsi, dan range nilai sangat pendek dimulai dari 0 (buruk) sampai dengan 3 (baik).
i. Personel yang ditugaskan untuk menilai pengelolaan kawasan tidak selalu orang yang tepat (tidak memahami kondisi lapangan). Penilai

seringkali o*ver confident* dalam pemberian nilai, tapi tidak disertai dengan penjelasan yang mamadai dalam lembar penilaian, bahkan seringkali *under estimate* dalam menentukan skor.

2. MANAJERIAL PENGAWALAN

a. Upaya *mainstreaming* METT belum optimal dan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap METT belum terinternalisasi dengan baik di lingkup Ditjen KSDAE.
b. Belum optimalnya pemantauan dan pengawalan yang kongkrit terhadap kawasan yang menjadi target penilaian, baik dari aspek penganggaran, aspek kegiatan, maupun dalam proses penilaian.
c. Proses perencanaan target volume (5 tahunan dan per tahun) dan penetapan lokasi belum mengantisipasi komulatif capaian.
d. Belum ditetapkan standar dukungan anggaran (pusat dan UPT/UPTD) dalam melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
e. Belum optimalnya dukungan SDM, tetutama personil fasilitator penilaian efektivitas (pusat dan UPT/ UPTD) .
f. Manajerial tata waktu yang belum optimal dalam mengatur waktu pelaksanaan penilaian, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja tahunan.
g. Tindak lanjut dari proses penilaian, yaitu rumusan rencana aksi, belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain itu, pendokumentasian proses penilaian masih dirasa sangat lemah.
h. Secara umum, target nilai efektivitas sebesar 70% menjadi kendala dalam memaknai penilaian efektivitas dengan menggunakan metode METT.

3. TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

a. Dengan metode METT, pengelola seharusnya dapat mengetahui kondisi kawasan secara umum dalam waktu yang relatif singkat (*rapid assessment*). Penilaian METT menghasilkan lembar resume yang merupakan rangkuman kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi untuk masing-masing pertanyaan pada 6 (enam) elemen. Namun, UPT belum optimal dalam menggunakan rekomendasi tersebut untuk bahan perencanaan.

b. Belum ada sistem yang menciptakan sinergitas antara hasil penilaian METT di UPT dan pengawalan anggaran oleh Pusat, meskipun hasil penilaian telah ditetapkan dalam SK Dirjen beserta rumusan tindak lanjutnya.

B. REKOMENDASI

1. Melakukan *review* metode penilaian yang mengadaptasi karakter pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dan meminimalkan *gab* antara hasil penilaian dan kondisi faktual di lapangan. Poin penting dalam pengelolaan yang efektif antara lain: kesesuaian tujuan penetapan/ nilai penting dengan pengelolaan; penguasaan/ kehadiran pengelola di lapangan/ kawasan; adanya pola pemanfaatan; masalah dilapangan terselesaikan; dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, pembobotan nilai pada masing-masing elemen juga menjadi hal penting.
2. Memastikan pengarusutamaan (*mainstreaming*) dan kepemilikan bersama (*ownership*) "evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi" pada proses perencanaan (teknokratik dan teknis Direktorat Jenderal KSDAE) serta implementasinya, dengan beberapa strategi sebagai berikut:
   a. Memastikan penilaian efektifitas merupakan bagian dari siklus pengelolaan dan bermanfaat bagi proses perencanaan pengelolaan.
   b. Menerapkan pola pemasaran dan *branding* yang kuat.
   c. Membangun figur/ *champion* yang kuat dan merespresentasikan semua unsur Direktorat Jederal KSDAE.
3. Diperlukan adanya *working group* pengawalan target yang dapat dipimpin oleh Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk pengangawalan anggaran dan memastikan dukungan *stakeholder*.

V. PENUTUP

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan metode METT memberikan peluang bagi pengelola untuk melakukan evaluasi secara mandiri dan secara cepat (*self-assessment and rapid-assessment*). Hasil penilaian METT tidak bisa digunakan untuk membandingkan antar kawasan, karena nilai tersebut merupakan hasil dari proses diskusi dengan melibatkan banyak stakeholder, dengan beragam latar belakang ilmu pengetahuan dan pengalaman, yang menghasilkan suatu konsensus dalam menilai pengelolaan.

Makna dari proses evaluasi pengelolaan adalah memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan dilakukan sesuai dengan mandat pengelolaan dan nilai penting kawasan, serta tujuan pengelolaan yang telah disepakati bersama. Selain itu, sebagai bagian dari siklus pengelolaan, hasil evaluasi merupakan salah satu kesempatan untuk memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perencanaan di tahun berikutnya. Dengan itu, konsep *adaptive management* dapat terwujud dalam rangka efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

REFERENSI

Ariyanto, A. C., Sulastriningsih, D., Risdianto, D., Wilianto, E., Indraswati, E., Muslich, M., Kholis, M., Puspita, O. R., Nugraha, R. T., Komara, W. Y., Susilo, Y. D. 2017. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2017. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK.

Fiona Leverington, Katia Lemos Costa, Jose Courrau, Helena Pavese, Christoph Nolte, Melitta Marr, Lauren Coad, Neil Burgess, Bastian Bomhard, Marc Hockings. 2010. *Management effectiveness evaluation in protected areas – a global study*. 2nd *edition* 2010. The University of Queensland Brisbane AUSTRALIA

Hockings, M., S. Stolton, F. Leverington, N. Dudley, and J. Courrau. 2006. *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas. 2nd Edition*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambirdge, UK

Hockings, M., F. Leverington, C. Cook. 2015. *Protected Area Management Effectiveness,* in G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary, and I. Pulsford (eds) *Protected Area Governance and Management,* pp. 889-928. ANU Press, Canberra.

Sulastriningsih, D., Komara, W., Y., Muslich, M., and Wilianto, E. 2016. Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2016. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK.

LAMPIRAN

REKAP NILAI
PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	TOTAL KK				**135**	**29**	**396**	**214**	**346**	
A	**BALAI / BALAI BESAR TN**									
	KK dinilai				**49**	**22**	**51**	**14**	**35**	
	>70				**11**	**22**	**35**	**12**	**35**	
1	BBTN Gunung Leuser	1	Gunung Leuser	TN	67	70	70		70	70
2	BBTN Kerinci Seblat	2	Kerinci Seblat	TN	62		68	68	72	72
3	BBTN Bukit Barisan Selatan	3	Bukit Barisan Selatan	TN	68	71	74		77	77
4	BBTN Gunung Gede Pangrango	4	Gunung Gede Pangrango	TN	80		81			81
5	BBTN Bromo Tengger Semeru	5	Bromo Tengger Semeru	TN	65	71	76			76
6	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	6	Betung Kerihun	TN	58		69		76	76
		7	Danau Sentarum	TN	70		75		82	82
7	BBTN Lore Lindu	8	Lore Lindu	TN	66	70	72			72
8	BBTN Teluk Cenderawasih	9	Teluk Cenderawasih	TNL	64	73	73		78	78
9	BTN Batang Gadis	10	Batang Gadis	TN	53		68	70		70
10	BTN Siberut	11	Siberut	TN	62		68	70	73	73
11	BTN Tesso Nilo	12	Tesso Nilo	TN	53		64	73	71	71
12	BTN Bukit Dua Belas	13	Bukit Dua Belas	TN	65		67	76		76
13	BTN Bukit Tiga Puluh	14	Bukit Tiga Puluh	TN	58	70	70		74	74
14	BTN Berbak dan Sembilang	15	Sembilang	TN	62		66	72	75	75
		16	Berbak	TN	60		70	73	76	76
15	BTN Way Kambas	17	Way Kambas	TN	65		69	75	71	71
16	BTN Ujung Kulon	18	Ujung Kulon	TN	77		80		82	82
17	BTN Kepulauan Seribu	19	Kepulauan Seribu	TNL	71		70		78	78
18	BTN Gunung Halimun Salak	20	Gunung Halimun Salak	TN	71		77		70	70
19	BTN Gunung Ciremai	21	Gunung Ciremai	TN	65	70	74		82	82
20	BTN Gunung Merapi	22	Gunung Merapi	TN	65	70	71		71	71
21	BTN Gunung Merbabu	23	Gunung Merbabu	TN	54	76	76		81	81
22	BTN Meru Betiri	24	Meru Betiri	TN	68	70	75			75
23	BTN Baluran	25	Baluran	TN	68	70	70			70
24	BTN Karimun Jawa	26	Karimun Jawa	TNL	77		73		79	79
25	BTN Alas Purwo	27	Alas Purwo	TN	75		80		81	81
26	BTN Bali Barat	28	Bali Barat	TN	73		75			75
27	BTN Gunung Rinjani	29	Gunung Rinjani	TN	65	70	72	70	70	70
28	BTN Komodo	30	Komodo	TN	69	70	73		73	73
29	BTN Gunung Tambora	31	Gunung Tambora	TN			52	67	72	72
30	BTN Kelimutu	32	Kelimutu	TN	66		69	75		75
31	BTN Kayan Mentarang	33	Kayan Mentarang	TN	62		68		72	72
32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	34	Bukit Baka Bukit Raya	TN	64	70	74		79	79
33	BTN Gunung Palung	35	Gunung Palung	TN	67	70	76			76
34	BTN Sebangau	36	Sebangau	TN	62	78	78		77	77
35	BTN Kutai	37	Kutai	TN	64	70	80			80
36	BTN Tanjung Puting	38	Tanjung Puting	TN	67	71	73			73
37	BTN Kepulauan Togean	39	Kepulauan Togean	TNL	46		61	74	82	82
38	BTN Bantimurung-Bulusaraung	40	Bantimurung-Bulusaraung	TN	72		77			77
39	BTN Bogani Naniwartabone	41	Bogani Nani Wartabone	TN		70	74		77	77
40	BTN Bunaken	42	Bunaken	TNL	66	71	71		77	77
41	BTN Aketajawe Lolobata	43	Aketajawe Lolobata	TN	61		73			73
42	BTN Matalawa	44	Manupeu Tanah Daru	TN	61	70	80		81	81
		45	Laiwangi Wanggameti	TN	58		63	70	85	85
43	BTN Rawa Aopa Watumohai	46	Rawa Aopa Watumohai	TN	61		68	78		78
44	BTN Taka Bonerate	47	Taka Bonerate	TNL	69	74	74		84	84
45	BTN Wakatobi	48	Wakatobi	TNL	74		79		83	83
46	BTN Manusela	49	Manusela	TN	68		66		77	77
47	BTN Lorentz	50	Lorentz	TN	52		60		70	70

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
48	BTN Wasur	51	Wasur	TN	70		75			75
B	**BALAI / BALAI BESAR KSDA**				**83**	**6**	**316**	**200**	**279**	
1	**BBKSDA Riau**									
	KK dinilai				**5**	**0**	**14**	**5**	**12**	
	> 70				**0**	**0**	**0**	**3**	**8**	
	CA			**2**						
	KSA/KPA			**4**						
	SM			**10**						
	TB			**1**						
	TN			**1**						
	TWA			**3**						
		1	Bukit Bungkuk	CA	32		35		70	70
		2	Pulau Berkeh	CA	38		53		70	70
		3	Gunung Kijang	KSA/KPA						0
		4	Gunung Lengkuas	KSA/KPA						0
		5	Mahato	KSA/KPA						0
		6	Sungai Pulai	KSA/KPA						0
		7	Balai Raja	SM			30		67	67
		8	Bukit Batu	SM			36		71	71
		9	Bukit Rimbang Bukit Baling	SM	33		67	69	76	76
		10	Giam Siak Kecil	SM	42		62	68	72	72
		11	Kerumutan	SM			38		70	70
		12	PLG Sebanga	SM						0
		13	Tasik Belat	SM						0
		14	Tasik Besar (Serkap)	SM					45	45
		15	Tasik Serkap (Tasik Sarang Burung)	SM			22		47	47
		16	Tasik Tanjung Padang	SM			23		73	73
		17	Pulau Rempang	TB			32		62	62
		18	Zamrud	TN	36		58	73		73
		19	Buluh Cina	TWA			42		70	70
		20	Muka Kuning	TWA			58	71		71
		21	Sungai Dumai	TWA			61	70		70
2	**BBKSDA Sumatera Utara**									
	KK dinilai				**7**	**0**	**14**	**14**	**14**	
	> 70				**0**	**0**	**0**	**6**	**12**	
	CA			**10**						
	KSA/KPA			**1**						
	SM			**4**						
	TB			**1**						
	TN			**0**						
	TWA			**7**						
		1	Batu Gajah	CA						0
		2	Batu Ginurit	CA						0
		3	Dolok Lubuk Raya	CA						0
		4	Dolok Saut	CA						0
		5	Dolok Sibual-Buali	CA			65	70	74	74
		6	Dolok Sipirok	CA	52		62	60	73	73
		7	Dolok Tinggi Raja	CA	47		62	68	73	73
		8	Liang Balik	CA						0
		9	Martelu Purba	CA			61	62	70	70
		10	Sibolangit	CA			58	71	75	75
		11	Sei Ledong	KSA/KPA						0
		12	Barumun	SM	54		55	67	73	73
		13	Dolok Surungan	SM	48		63	63	70	70
		14	Karang Gading Langkat Timur Laut	SM			60	71	76	76
		15	Siranggas	SM	44		61	70	73	73
		16	Pulau Pini	TB			35	36	36	36

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		17	Deleng Lancuk	TWA	41		56	49	49	49
		18	Dolok Tinggi Raja	TWA						0
		19	Holiday Resort	TWA						0
		20	Lau Debuk-debuk	TWA			56	65	70	70
		21	Sibolangit	TWA			67	73	75	75
		22	Sicike-cike	TWA	49		65	72	72	72
		23	Sijaba Huta Ginjang	TWA						0
3	**BBKSDA Jawa Barat**									
	KK dinilai				**11**	**5**	**34**	**22**	**22**	
	> 70				**0**	**5**	**5**	**6**	**16**	
	CA			**27**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**3**						
	TB			**1**						
	TN			**0**						
	TWA			**17**						
		1	Bojong Larang Jayanti	CA			49			49
		2	Cadas Malang	CA			54	60	62	62
		3	Cibanteng	CA			58	63	71	71
		4	Cigenteng Cipanyi	CA			54	57	57	57
		5	Dungus Iwul	CA						0
		6	Gunung Burangrang	CA	41		64	74	76	76
		7	Gunung Jagat	CA						0
		8	Gunung Papandayan	CA	38		67	67	70	70
		9	Gunung Simpang	CA			44	60	65	65
		10	Gunung Tangkuban Perahu	CA	43	70	70			70
		11	Gunung Tilu	CA			72			72
		12	Gunung Tukung Gede	CA						0
		13	Junghuhn	CA			56	56	61	61
		14	Kawah Kamojang	CA			65	68	71	71
		15	Leuweung Sancang	CA						0
		16	Malabar	CA						0
		17	Nusa Gede Panjalu	CA	44		54	65	71	71
		18	Pananjung Pangandaran	CA	54	70	54	69	71	71
		19	Pulau Dua	CA			59			59
		20	Rawa Danau	CA			57			57
		21	Sukawayana	CA			64	70	71	71
		22	Takokak	CA			47	56	58	58
		23	Talaga Bodas	CA			64	66	71	71
		24	Tangkuban Perahu - Pelabuhan Rat	CA	48		44	48	56	56
		25	Telaga Patengan	CA			63	72	73	73
		26	Telaga Warna	CA	46		52	61		61
		27	Yanlapa	CA						0
		28	Cikepuh	SM			70			70
		29	Gunung Sawal	SM						0
		30	Sindangkerta	SM						0
		31	Masigit Kareumbi	TB						0
		32	Cimanggu	TWA	45		67	71	74	74
		33	Darajat	TWA						0
		34	Gunung Guntur	TWA			50			50
		35	Gunung Pancar	TWA			58	65	70	70
		36	Gunung Papandayan	TWA		74				74
		37	Gunung Tampomas	TWA						0
		38	Jember	TWA			54			54
		39	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	TWA	51	73				73
		40	Kamojang	TWA			68	72	73	73
		41	Linggarjati	TWA			61	71	71	71
		42	Pananjung Pangandaran	TWA	55	72	72			72

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		43	Pulau Sangiang	TWA			49			49
		44	Rumpin	TWA						0
		45	Sukawayana	TWA			60	68	71	71
		46	Talaga Bodas	TWA	39		56			56
		47	Telaga Patengan	TWA			63	68	70	70
		48	Telaga Warna	TWA			70		70	70
4	**BBKSDA Jawa Timur**									
	KK dinilai				**4**	**0**	**22**	**6**	**12**	
	> 70				**0**	**0**	**6**	**4**	**8**	
	CA			**20**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**3**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**3**						
		1	Manggis Gadungan	CA			66	72		72
		2	Besowo Gadungan	CA						0
		3	Ceding	CA			53		60	60
		4	Curah Manis Sempolan I-VII	CA			58		65	65
		5	Gua Nglirip	CA	47		56		72	72
		6	Gunung Abang	CA			57		65	65
		7	Gunung Picis	CA			76			76
		8	Gunung Sigogor	CA			70			70
		9	Janggangan Rogojampi I	CA			39		64	64
		10	Janggangan Rogojampi II	CA	43		58		72	72
		11	Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	CA			72			72
		12	Pancur Ijen I	CA	54		54			54
		13	Pancur Ijen II	CA					71	71
		14	Pulau Bawean	CA			64	70		70
		15	Pulau Noko	CA						0
		16	Pulau Nusa	CA			70			70
		17	Pulau Sempu	CA			61		73	73
		18	Saobi	CA			59		72	72
		19	Sungai Kolbu Iyang Plateau	CA			51		74	74
		20	Watangan Puger	CA			65	65	73	73
		21	Dataran Tinggi Yang	SM			65	67	77	77
		22	Pulau Bawean	SM			75			75
		23	Pulau Nusa Barung	SM						0
		24	Gunung Baung	TWA	61		63	70		70
		25	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	TWA			78			78
		26	Tretes	TWA			67	71		71
5	**BBKSDA NTT**									
	KK dinilai				**5**	**0**	**15**	**3**	**9**	
	> 70				**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	
	CA			**9**						
	KSA/KPA			**1**						
	SM			**6**						
	TB			**2**						
	TN			**0**						
	TWA			**12**						
		1	Hutan Bakau Maubesi	CA	44		52		71	71
		2	Gunung Mutis	CA			41			41
		3	Kemang Boleng I	CA						0
		4	Kemang Boleng II	CA						0
		5	Ndeta Kelikima	CA						0
		6	Riung	CA	35		28			28
		7	Wae Wuul	CA	47		51		51	51
		8	Watu Ata	CA			35			35

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		9	Wolo Tado	CA			38		39	39
		10	Sisimeni Sanam	KSA/KPA						0
		11	Ale Aisio	SM	44		51		63	63
		12	Danau Tuadale	SM						0
		13	Egon Ilimedo	SM			45		61	61
		14	Harlu	SM	46		55		64	64
		15	Kateri	SM						0
		16	Perhatu	SM						0
		17	Dataran Bena	TB						0
		18	Pulau Ndana	TB						0
		19	Baumata	TWA			48			48
		20	Bipolo	TWA						0
		21	Camplong	TWA			60	67	71	71
		22	Gugus Pulau Teluk Maumere	TWAL			38			38
		23	Manipo	TWA			55	67	71	71
		24	Pulau Batang	TWA						0
		25	Pulau Lapang	TWA						0
		26	Pulau Rusa	TWA						0
		27	Ruteng	TWA			66	73	75	75
		28	Teluk Kupang	TWA						0
		29	Tujuh Belas Pulau	TWA			53			53
		30	Tuti Adagae	TWA						0
6	**BBKSDA Sulawesi Selatan**									
	KK dinilai				**3**	**1**	**12**	**4**	**9**	
	> 70				**0**	**1**	**3**	**3**	**4**	
	CA			**3**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**1**						
	TB			**1**						
	TN			**1**						
	TWA			**8**						
		1	Faruhumpenai	CA	55		69	66	70	70
		2	Kalaena	CA			74		70	70
		3	Ponda-ponda	CA			77		71	71
		4	Komara	SM			64	71		71
		5	Komara	TB			69	70		70
		6	Gandang Dewata	TN						0
		7	Cani Sirenreng	TWA			53		56	56
		8	Danau Mahalona	TWA	38		46		60	60
		9	Danau Matano	TWA			46		59	59
		10	Danau Towuti	TWA	49		46		56	56
		11	Lejja	TWA		70	71		76	76
		12	Malino	TWA						0
		13	Nanggala III	TWA			54		64	64
		14	Sidrap	TWA			52	70		70
7	**BBKSDA Papua**									
	KK dinilai				**3**	**0**	**6**	**0**	**7**	
	> 70				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	CA			**8**						
	KSA/KPA			**1**						
	SM			**7**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**3**						
		1	Biak Utara	CA						0
		2	Bupul	CA						0
		3	Enarotali	CA						0
		4	Pegunungan Cycloops	CA	43		61		65	65

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		5	Pegunungan Wayland	CA						0
		6	Yapen Tengah	CA			43		48	48
		7	Pulau Supiori	CA					49	49
		8	Tanjung Wiay	CA	28		56		58	58
		9	Mapia	KSA/KPA						0
		10	Danau Bian	SM						0
		11	Memberamo Foja	SM						0
		12	Pegunungan Jayawijaya	SM						0
		13	Pulau Dolok	SM						0
		14	Pulau Komolon	SM						0
		15	Pulau Pombo	SM			34		34	34
		16	Savan	SM						0
		17	Nabire	TWA			53		49	49
		18	Supiori	TWA						0
		19	Teluk Youtefa	TWA	34		56		53	53
8	**BBKSDA Papua Barat**									
	KK dinilai				**3**	**0**	**11**	**11**	**16**	
	> 70				**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	
	CA			**15**						
	KSA/KPA			**1**						
	SM			**4**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**4**						
		1	Waigeo Timur	CA			57	69	74	74
		2	Waigeo Barat	CA			71	71	74	74
		3	Pualu Misool	CA					47	47
		4	Pegunungan Arfak	CA			52	51	56	56
		5	Pegunungan Fakfak	CA			46	49	60	60
		6	Pegunungan Tamrau Selatan	CA					26	26
		7	Pegunungan Tamrau Utara	CA					49	49
		8	Pegunungan Wondiboy	CA			48	47	49	49
		9	Pulau Salawati Utara	CA					35	35
		10	Teluk Bintuni	CA					51	51
		11	Pantai Sausafor	CA						0
		12	Pegunungan Kumawa	CA						0
		13	Pulau Batanta Barat	CA						0
		14	Pulau Kofiau	CA						0
		15	Wagura Kote	CA						0
		16	Hutan Pendidikan Tuan Wowi	KSA/KPA						0
		17	Mubrani - Kaironi	SM			41	47	48	48
		18	Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	SM						0
		19	Pulau Venu	SM						0
		20	Sidei Wibain	SM	13		43	41	46	46
		21	Beriat	TWA	33		60	65	64	64
		22	Gunung Meja	TWA	47		66	70	56	56
		23	Klamono	TWA			43	51	63	63
		24	Sorong	TWA			70	70	70	70
9	**BKSDA Aceh**									
	KK dinilai				**3**	**0**	**8**	**7**	**8**	
	> 70				**0**	**0**	**1**	**4**	**7**	
	CA			**2**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**1**						
	TB			**1**						
	TN			**0**						
	TWA			**4**						

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		1	Janthoi	CA	50		67	70	87	87
		2	Serbojadi	CA			52	65	74	74
		3	Rawa Singkil	SM	55		66	78	78	78
		4	Lingga Isaq	TB			52	67	78	78
		5	Jhanto	TWA			52	72	81	81
		6	Kepulauan Banyak	TWA	47		65	71	79	79
		7	Kuta Malaka	TWA			40	47	52	52
		8	Pulau Weh	TWA			73		80	80
10	**BKSDA Sumatera Barat**									
	KK dinilai				**3**	**0**	**14**	**11**	**15**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	
	CA			**8**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**4**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**8**						
		1	Baringin Sati	CA						0
		2	Batang Palupuh	CA			52	54	55	55
		3	Batang Pangean I	CA			33		52	52
		4	Batang Pangean II	CA	51		51		52	52
		5	Lembah Anai	CA						0
		6	Lembah Harau	CA	54				53	53
		7	Maninjau	CA			51	50	50	50
		8	Rimbo Panti	CA						0
		9	Arau Hilir dan Air Tarusan	SM			48	56	53	53
		10	Barisan	SM			51	64	61	61
		11	Malampah Alahan Panjang	SM			58	61	58	58
		12	Pagai Selatan	SM						0
		13	Air Putih Kelok 9	TWA			53		53	53
		14	Gunung Marapi	TWA			54	57	60	60
		15	Gunung Sago Malintang	TWA			39	53	52	52
		16	Lembah Harau	TWA			48	67	71	71
		17	Mega Mendung	TWA			37	50	49	49
		18	Rimbo Panti	TWA	54		54	60	59	59
		19	Saibi Sarabua	TWA						0
		20	Singgalang Tandikat	TWA			42	53	53	53
11	**BKSDA Jambi**									
	KK dinilai				**1**	**0**	**3**	**3**	**4**	
	> 70				**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	
	CA			**4**						
	KSA/KPA			**2**						
	SM			**0**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**0**						
		1	Durian Luncuk I	CA			62	71	74	74
		2	Durian Luncuk II	CA			67	73	73	73
		3	Hutan Bakau Pantai Timur	CA	55		62	70		70
		4	Sungai Batara	CA						0
		5	Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau I	KSA/KPA					39	39
		6	Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	KSA/KPA					39	39
12	**BKSDA Bengkulu dan Lampung**									
	KK dinilai				**5**	**0**	**22**	**7**	**21**	
	> 70				**0**	**0**	**2**	**4**	**5**	
	CA			**23**						
	KSA/KPA			**1**						
	SM			**0**						

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	TB			**2**						
	TN			**0**						
	TWA			**10**						
		1	Air Alas	CA			43		58	58
		2	Air Seblat	CA	34		48		48	48
		3	Bukit Barisan Selatan	CA			44		42	42
		4	Danau Dusun Besar	CA	47		70			70
		5	Danau Menghijau	CA						0
		6	Kepulauan Krakatau	CA			75			75
		7	Kioyo I dan II	CA					71	71
		8	Muko-muko	CA					55	55
		9	Pagar Gunung I	CA			52			52
		10	Pagar Gunung II	CA						0
		11	Pagar Gunung III	CA	28		52		65	65
		12	Pagar Gunung IV	CA						0
		13	Pagar Gunung V	CA			58			58
		14	Pasar Ngalam	CA	49		56	66	71	71
		15	Pasar Seluma	CA			53	62	62	62
		16	Pasar Talo	CA			61	63	59	59
		17	Sungai Bahewo	CA						0
		18	Taba Penanjung I	CA			61	70	61	61
		19	Taba Pananjung II	CA						0
		20	Talang Ulu I	CA			61		65	65
		21	Talang Ulu II	CA						0
		22	Tanjung Laksaha	CA			63		76	76
		23	Teluk Klowe	CA			63	70		70
		24	Rawa Kandis	KSA/KPA						0
		25	Gunung Nanu'ua	TB			55		71	71
		26	Semidang Bukit Kabu	TB						0
		27	Air Hitam	TWA			63		70	70
		28	Air Ketebat Danau Tes	TWA			63		50	50
		29	Air Rami I/II	TWA	46		55	70	50	50
		30	Bukit Kaba	TWA			61	71	63	63
		31	Danau Dusun Besar	TWA					58	58
		32	Lubuk Tapi Kayu Ajaran	TWA			43		53	53
		33	Muko-muko	TWA						0
		34	Pantai Panjang dan Pulau Baai	TWA			57		68	68
		35	Seblat	TWA					62	62
		36	Way Hawang	TWA						0
13	**BKSDA Sumatera Selatan**									
	KK dinilai				**0**	**0**	**8**	**5**	**5**	
	>70				**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	
	CA			**0**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**6**						
	TB			**0**						
	TN			**1**						
	TWA			**4**						
		1	Bentayan	SM			61	70		70
		2	Dangku	SM			73		74	74
		3	Gumai Pasemah	SM			60	71		71
		4	Gunung Raya	SM			56		61	61
		5	Isau-isau Pasemah	SM			68	66	72	72
		6	Padang Sugihan	SM			68	70		70
		7	Gunung Maras	TN						0
		8	Bukit Selero (eks PLG KH Isau-isau)	TWA			60	63	66	66
		9	Gunung Permisan	TWA						0
		10	Jering Menduyung	TWA						0

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		11	Punti Kayu	TWA			71		75	75
14	**BKSDA Jakarta**									
	KK dinilai				**3**	**0**	**4**	**4**	**4**	
	> 70				**0**	**0**	**1**	**2**	**4**	
	CA			**1**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**2**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**1**						
		1	Pulau Bokor	CA	51		60	68	70	70
		2	Muara Angke	SM	46		69	66	73	73
		3	Pulau Rambut	SM			67	72	73	73
		4	Angke Kapuk	TWA	46		80	81	82	82
15	**BKSDA Jawa Tengah**									
	KK dinilai				**7**	**0**	**31**	**31**	**31**	
	> 70				**0**	**0**	**9**	**24**	**29**	
	CA			**28**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**1**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**5**						
		1	Bantarbolang	CA			64	70	71	71
		2	Bekutuk	CA	40		66	68	76	76
		3	Cabak	CA			71	70	70	70
		4	Curug Bengkawah	CA			58	61	65	65
		5	Donoloyo	CA			53	66	70	70
		6	Gebugan	CA						0
		7	Gunung Butak	CA	39		64	68	75	75
		8	Gunung Celering	CA			71	75	85	85
		9	Jatinegara	CA			55	70	71	71
		10	Karang Bolong	CA			72	73	77	77
		11	Kecubung Ulo Lanang	CA			67	71	72	72
		12	Keling I	CA			58	72	79	79
		13	Keling II/III	CA	49		70	71	75	75
		14	Kembang	CA			60	70	74	74
		15	Moga	CA	47		59	70	76	76
		16	Nusakambangan Barat	CA	56		68	70	73	73
		17	Nusakambangan Timur	CA			66	71	75	75
		18	Pager Wunung Darupono	CA			73	76	76	76
		19	Pantodomas	CA			61	70	72	72
		20	Peson Subah I	CA			55	63	64	64
		21	Peson Subah II	CA			54	65	71	71
		22	Pringombo I	CA			70	72	74	74
		23	Pringombo II	CA						0
		24	Sepakung	CA						0
		25	Telogo Dringo	CA			67	71	74	74
		26	Telogo Ranjeng	CA	46		63	70	71	71
		27	Telogo Sumurup	CA			67	72	71	71
		28	Wijaya Kusuma	CA			65	71	71	71
		29	Gunung Tunggangan	SM			58	67	71	71
		30	Grojogan Sewu	TWA	57		78	79	76	76
		31	Guci	TWA			63	71	75	75
		32	Gunung Selok	TWA			70	72	73	73
		33	Sumber Semen	TWA			54	70	75	75
		34	Telogo Warno / Telogo Pengilon	TWA			75	76	76	76
16	**BKSDA Yogyakarta**									

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	KK dinilai				2	0	4	1	5	
	>70				0	0	3	1	3	
	CA			2						
	KSA/KPA			0						
	SM			2						
	TB			0						
	TN			0						
	TWA			1						
		1	Gunung Batu Gamping	CA	49		70		68	68
		2	Imogiri	CA			69	74	74	74
		3	Paliyan	SM			70		70	70
		4	Sermo	SM	49		71		70	71
		5	Gunung Batu Gamping	TWA					68	68
17	BKSDA Bali									
	KK dinilai				2	0	5	5	5	
	> 70				0	0	0	1	5	
	CA			1						
	KSA/KPA			0						
	SM			0						
	TB			0						
	TN			0						
	TWA			4						
		1	Batukahu I-III	CA	52		57	56	70	70
		2	Danau Buyan - Danau Tamblingan	TWA			61	65	74	74
		3	Gunung Batur Bukit Payang	TWA			63	65	70	70
		4	Panelokan	TWA			62	70	72	72
		5	Sangeh	TWA	55		48	53	71	71
18	BKSDA NTB									
	KK dinilai				2	0	9	9	7	
	>70				0	0	2	3	3	
	CA			3						
	KSA/KPA			3						
	SM			0						
	TB			1						
	TN			0						
	TWA			11						
		1	Pulau Sangiang	CA	30		42	48	55	55
		2	Pedauh	CA						0
		3	Toffo Kota Lambu	CA						0
		4	Danuera	KSA/KPA						0
		5	Jereweh	KSA/KPA						0
		6	Pulau Panjang	KSA/KPA						0
		7	Pulau Moyo	TB			57	56		56
		8	Bangko Bangko	TWA			50	52	56	56
		9	Danau Rawa Taliwang	TWA			51	56	61	61
		10	Gunung Tunak	TWA			71	74		74
		11	Kerandangan	TWA			70	70	74	74
		12	Madapangga	TWA						0
		13	Pelangan	TWA						0
		14	Pulau Moyo	TWA						0
		15	Pulau Satonda	TWA			58	70	71	71
		16	Semongkat	TWA						0
		17	Suranadi	TWA			63	66	74	74
		18	Tanjung Tampa	TWA	40		39	36	46	46
19	BKSDA Kalimantan Barat									
	KK dinilai				2	0	13	5	10	
	> 70				0	0	0	3	3	
	CA			6						

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**0**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**7**						
		1	Gunung Raya Pasi	CA			68	70		70
		2	Karimata	CA			57		56	56
		3	Lo Pat Foen Pi	CA	50		48		52	52
		4	Mandor	CA			55		55	55
		5	Muara Kendawangan	CA			58		70	70
		6	Nyiut Penrissen	CA			65	70		70
		7	Asuansang	TWA			54		54	54
		8	Baning	TWA			56	64	70	70
		9	Bukit Kelam	TWA			50		71	71
		10	Gunung Dungan / Gunung Batu	TWA	45		47		46	46
		11	Gunung Melintang	TWA			53		54	54
		12	Sungai Liku	TWA			60	63	64	64
		13	Tanjung Belimbing	TWA			64	74		74
20	**BKSDA Kalimantan Selatan**									
	KK dinilai				**2**	**0**	**7**	**6**	**9**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	
	CA			**4**						
	KSA/KPA			**2**						
	SM			**3**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**4**						
		1	Gunung Kentawan	CA			58	68	72	72
		2	Sungai Bulan dan Sungai Lulan	CA					52	52
		3	Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Se	CA			65	59	62	62
		4	Teluk Pamukan	CA					60	60
		5	Asam-asam	KSA/KPA						0
		6	Tanjung Pengharapan - Sungai Embung	KSA/KPA						0
		7	Kuala Lupak	SM	45		66	67	70	70
		8	Pleihari Tanah laut	SM			59	72		72
		9	Pulau Kaget	SM	45		66	70	71	71
		10	Pleihari Tanah Laut	TWA			66	59	61	61
		11	Pulau Bakut	TWA			52		71	71
		12	Pulau Burung dan Suwangi	TWA						0
		13	Pulau Kembang	TWA					62	62
21	**BKSDA Kalimantan Tengah**									
	KK dinilai				**0**	**0**	**6**	**5**	**4**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	
	CA			**3**						
	KSA/KPA			**7**						
	SM			**1**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**2**						
		1	Bukit Sapat Hawung	CA			28	46		46
		2	Bukit Tangkiling	CA			55			55
		3	Pararawen I dan II	CA			51	58	64	64
		4	Bukit Rawi (Eks PLG II)	KSA/KPA						0
		5	EX PLG IV	KSA/KPA						0
		6	Marang (Eks PLG I)	KSA/KPA						0
		7	Sei Sebangau	KSA/KPA						0
		8	Sungai Barito	KSA/KPA						0

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		9	Sungai Kapuas	KSA/KPA						0
		10	Tanjung Malatayur	KSA/KPA						0
		11	Lamandau	SM			69	70	75	75
		12	Bukit Tangkiling	TWA			59	60	62	62
		13	Tanjung Keluang	TWA			62	63	70	70
22	**BKSDA Kalimantan Timur**									
	KK dinilai				**1**	**0**	**6**	**6**	**1**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	
	CA			**4**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**1**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**1**						
		1	Muara Kaman Sedulang	CA	53		53	59		59
		2	Padang Luwai	CA			58	63		63
		3	Teluk Adang	CA			64	71		71
		4	Teluk Apar	CA			44	62		62
		5	Pulau Semama	SM			58	64		64
		6	Pulau Sangalaki	TWA			65	67	70	70
23	**BKSDA Sulawesi Tenggara**									
	KK dinilai				**0**	**0**	**12**	**12**	**12**	
	>70				**0**	**0**	**2**	**3**	**12**	
	CA			**3**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**5**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**4**						
		1	Kakenauwe	CA			44	62	74	74
		2	Lamedae	CA			71	72	75	75
		3	Napabalano	CA			49	56	73	73
		4	Buton Utara	SM			51	61	71	71
		5	Lambusango	SM			53	62	73	73
		6	Tanjung Amolengo	SM			64	64	71	71
		7	Tanjung Batikolo	SM			62	65	71	71
		8	Tanjung Peropa	SM			70	71	73	73
		9	Kepulauan Padamarang	TWAL			49	66	77	77
		10	Mangolo	TWA			60	67	71	71
		11	Teluk Lasolo	TWAL			43	74	78	78
		12	Tirta Rimba / Air Jatuh	TWA			49	61	73	73
24	**BKSDA Sulawesi Tengah**									
	KK dinilai				**6**	**0**	**18**	**18**	**18**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	
	CA			**7**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**6**						
	TB			**1**						
	TN			**0**						
	TWA			**4**						
		1	Gunung Dako	CA			53	62	64	64
		2	Gunung Sojol	CA			50	69	70	70
		3	Gunung Tinombala	CA			59	68	71	71
		4	Morowali	CA	46		52	63	65	65
		5	Pamona	CA	54		57	68	73	73
		6	Pangi Binangga	CA			62	51	65	65
		7	Tanjung Api	CA			50	56	65	65
		8	Bakiriang	SM	51		55	65	75	75

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		9	Lombuyan	SM			55	56	58	58
		10	Pati-Pati	SM			48	50	63	63
		11	Pinjan/Tanjung Matop	SM	43		62	65	63	63
		12	Pulau Dolangan	SM	39		44	49	53	53
		13	Tanjung Santigi	SM			52	60	64	64
		14	Landusa Tomata	TB			51	55	58	58
		15	Bancea	TWA			51	57	65	65
		16	Pulau Pasoso	TWA	42		51	49	73	73
		17	Pulau Tokobae	TWA			34	34	47	47
		18	Wera	TWA			57	62	71	71
25	**BKSDA Sulawesi Utara**									
	KK dinilai				**0**	**0**	**13**	**0**	**13**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	CA			**7**						
	KSA/KPA			**0**						
	SM			**3**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**3**						
		1	Gunung Ambang	CA			42		46	46
		2	Gunung Dua Sudara	CA			47		67	67
		3	Gunung Lokon	CA			51		50	50
		4	Mas Popaya Raja	CA			49		61	61
		5	Panua	CA			49		67	67
		6	Tangale	CA			45		47	47
		7	Tanjung Panjang	CA			40		47	47
		8	Nantu	SM			45		63	63
		9	Gunung Manembo-nembo	SM			56		49	49
		10	Karakelang	SM			49		46	46
		11	Batu Angus	TWA			46		57	57
		12	Batu Putih	TWA			50		57	57
		13	Gunung Ambang	TWA			42		52	52
26	**BKSDA Maluku**									
	KK dinilai				**3**	**0**	**5**	**0**	**6**	
	>70				**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	
	CA			**13**						
	KSA/KPA			**6**						
	SM			**6**						
	TB			**0**						
	TN			**0**						
	TWA			**4**						
		1	Bekau Huhun	CA						0
		2	Gunung Api Kisar	CA						0
		3	Gunung Sibela Pulau Bacan	CA						0
		4	Lifamatola	CA						0
		5	Pombo	CA						0
		6	Pulau Angwarmase	CA						0
		7	Pulau Nustaram	CA						0
		8	Pulau Nuswotar	CA						0
		9	Pulau Obi	CA						0
		10	Pulau Seho	CA						0
		11	Taliabu	CA						0
		12	Tanjung Sial	CA			20		55	55
		13	Tobalai	CA						0
		14	Daab	KSA/KPA						0
		15	Danau Tihu	KSA/KPA						0
		16	Gunung Sahuwai	KSA/KPA						0

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN		FUNGSI	TAHUN PENILAIAN / NILAI %					BASE LINE NILAI
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		17	Pulau Larat	KSA/KPA						0
		18	Sungai Niff	KSA/KPA						0
		19	Tafermaar	KSA/KPA						0
		20	Masbait	SM						0
		21	Pulau Baun	SM						0
		22	Pulau Kasa	SM					75	75
		23	Pulau Kobror	SM						0
		24	Pulau Manuk	SM						0
		25	Tanimbar	SM						0
		26	Gunung Api Banda	TWA			48		75	75
		27	Pulau Kasa	TWAL	44		28		71	71
		28	Pulau Marsegu	TWAL	46		33		74	74
		29	Pulau Pombo	TWAL	52		36		70	70
C	**UPTD TAHURA**									
	KK dinilai				**3**	**1**	**29**	**0**	**32**	
	>70				**0**	**1**	**4**	**0**	**14**	
1	UPTD Tahura Subulussalam	1	Subulussalam	THR			35		34	34
2	UPTD Tahura Pocut Meurah Intan	2	Pocut Meurah Intan	THR			52		58	58
3	UPTD Tahura Simeulue	3	Simeulue	THR						0
4	UPTD Tahura Bukit Barisan	4	Bukit Barisan	THR			50		60	60
5	UPTD Tahura Sultan Syarif Kasim (Minas)	5	Sultan Syarif Kasim (Minas)	THR			46		63	63
6	UPTD Tahura Dr. Muhammad Hatta	6	Dr. Muhammad Hatta	THR	17		17		58	58
7	UPTD Tahura Bukit Sari	7	Bukit Sari	THR					65	65
8	UPTD Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	8	Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	THR			37		60	60
9	UPTD Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	9	Sultan Thaha Syaifuddin	THR			50		49	49
10	UPTD Tahura Bukit Rabang-Gluguran	10	Bukit Rabang - Gluguran	THR			20		20	20
11	UPTD Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	11	Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	THR			16		31	31
12	UPTD Tahura Wan Abdul Rahman	12	Wan Abdul Rahman	THR			56		70	70
13	UPTD Tahura Gunung Lalang	13	Gunung Lalang	THR					12	12
14	UPTD Tahura Gunung Mangkol	14	Gunung Mangkol	THR			53		63	63
15	UPTD Tahura Gunung Menumbing	15	Gunung Menumbing	THR					45	45
16	UPTD Tahura Banten	16	Banten	THR			65		71	71
17	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	17	Gunung Palasari - Gunung Kunci	THR			60		61	61
18	UPTD Tahura Ir. H. Juanda	18	Ir. H. Juanda	THR		74	74		73	73
19	UPTD Tahura Pancoran Mas	19	Pancoran Mas	THR			46		55	55
20	UPTD Tahura KGPAA Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	20	KGPAA Mangkunegoro I	THR			58		70	70
21	UPTD Tahura Gunung Bunder	21	Gunung Bunder	THR			67		73	73
22	UPTD Tahura R. Soeryo	22	R. Soeryo	THR			72		77	77
23	UPTD Tahura Ngurah Rai	23	Ngurah Rai	THR	59		70		74	74
24	UPTD Tahura Nuraksa	24	Nuraksa	THR			49		65	65
25	UPTD Tahura Prof. Ir. Herman Johannes	25	Prof. Ir. Herman Johannes	THR			43		45	45
26	UPTD Tahura Sultan Adam	26	Sultan Adam	THR					70	70
27	UPTD Tahura Lapak Jaru	27	Lapak Jaru	THR			32		70	70
28	UPTD Tahura Bukit Soeharto	28	Bukit Soeharto	THR			41		66	66
29	UPTD Tahura Lati Petangis	29	Lati Petangis	THR			53		70	70
30	UPTD Tahura Murhum	30	Murhum	THR	52		52		70	70
31	UPTD Tahura Abdul Latief/Sinjai	31	Abdul Latief/Sinjai	THR			74		73	73
32	UPTD Tahura Bontobahari	32	Bontobahari	THR			58			58
33	UPTD Tahura Sulteng	33	Sulteng	THR			66		71	71
34	UPTD Tahura Gunung Tumpa (Haveworang)	34	Gunung Tumpa (Haveworang)	THR			60		76	76

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM & EKOSISTEM
DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat - 10270

021-5720229 perencanaankk@gmail.com